



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT  
KOMISI VIII DPR RI  
(BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

<b>Tahun Sidang</b>	: 2019/2020
<b>Masa Persidangan</b>	: IV
<b>Jenis Rapat</b>	: Rapat Dengar Pendapat
<b>Hari, Tanggal</b>	: Rabu, 15 Juli 2020
<b>Pukul</b>	: 13.00 - 16.25 WIB
<b>Sifat</b>	: Terbuka
<b>Tempat</b>	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI
<b>Ketua Rapat</b>	: Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si
<b>Acara</b>	: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2020;</li><li>2. Evaluasi Kinerja dan Anggaran Penyaluran Program Sosial Penanggulangan Dampak Covid-19.</li><li>3. Isu-isu aktual dan solusinya.</li></ol>
<b>Sekretaris Rapat</b>	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
<b>Hadir</b>	: 31 Anggota dari 52 Anggota

**PIMPINAN**

1. H. M. Ihsan Yunus, M.E. Con. Std. (F-PDIP)
2. Dr. H. Tb. Ace Hasan Syadzily, M.Si/(F-P.Golkar)
3. Laksdya TNI Purn Moekhlas Sidik, M.P.A. (F-P.Gerindra)

**Fraksi PDIP**

4. I Komang Koheri, S.E.
5. Ign Kesuma Kelakan, S.T. M.Si.
6. H. Arwan M. Aras T., S.Kom.
7. Ina Ammania
8. Drs. H. Samsu Niang, M.Pd

**Fraksi P-GOLKAR**

9. Hj. Itje Siti Dewi Kuraesin,  
S.Sos., M.M.
10. Hj. Endang Maria Astuti, S, Ag.,  
S.H., M.H.
11. Muhammad Fauzi, S.E.
12. Dra. Hj. Idah Syahidah Rusli  
Habibie, M.H.
13. Muhammad Ali Ridha.

**Fraksi P-GERINDRA**

14. Dr. H. Jefry Romdonny, S.E.,  
S.Sos., M.Si.
15. M. Husni, S.E., M.M
16. Abdul Wachid.

**Fraksi P- NASDEM**

17. Nurhadi, S.Pd.
18. Hj. Lisda Hendrajoni, S.E.,  
M.Mtr.
19. Satori, S.Pd.I., M.M.

**Fraksi P- DEMOKRAT**

20. Drs. H. Acmad, M.Si.
21. H. Hasani Bin Zuber, S.I.P.
22. Ir. H. Nanang Samodra, K.A.,  
M.Sc.

**Fraksi PKS**

23. K.H. Bukhori, Lc. M.A.
24. H. Iskan Qolba Lubis, M.A.
25. Dr. H.M Hidayat Nurwahid, M.A.
26. Hj. Nur Azizah Tamhid, B.A.,  
M.A.
27. H. Nurhasan Zaidi, S.Sos.I

**Fraksi PAN**

28.H. Mhd. Asli Chaidir, S.H.

29.H. Sungkono

**Fraksi PKB**

30.H. Maman Imanul Haq.

31.Dra. Hj. Anisah Syakur, M.Ag.

**Fraksi PPP**

-

**Izin**

: -

**Undangan**

1. Ketua Badan Amil Zakat Nasional, Prof. Dr. Bambang Sudibyo, M.B.A., C.A.
2. Direktur Utama Baznas, Mohammad Arifin Purwakananta.
3. Beserta jajaran Baznas.

## **JALANNYA RAPAT**

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*  
Salam Sejahtera bagi kita semua.

**Yang terhormat para Pimpinan serta Anggota Komisi VIII DPR RI.  
Yang terhormat Saudara Ketua Badan Amil Zakat Nasional beserta seluruh jajarannya.  
Hadirin sekalian yang berbahagia.**

Mengawali Rapat Dengar Pendapat hari ini pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga dapat mengikuti rapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Badan Amil Zakat dan seluruh jajarannya.

Sebelum acara ini di lanjutkan sebagaimana kebiasaan kami di Komisi VIII maka marilah kita sama-sama membacakan doa untuk kelancaran dan kesuksesan acara ini dengan membaca Ummul kitab bagi yang beragama Islam sementara bagi yang beragama non muslim di persilakan sesuai dengan keyakinannya masing-masing, membaca surah Al Fatihah. Selesai.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sesuai dengan acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 2020 yang telah diputuskan di dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus antara Pimpinan DPR RI dengan fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 30 April 2020 dan sesuai dengan Keputusan Rapat Internal Komisi VIII DPR RI pada tanggal 15 Juni 2020 maka kami Komisi VIII DPR RI menyepakati untuk menggelar rapat dengan Ketua Baznas dan seluruh jajarannya dengan agenda evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020; evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19 serta isu-isu aktual dan solusinya.

**Hadirin yang kami hormati.**

Menurut laporan dari Sekretariat pada rapat kali ini telah hadir sebanyak 22 orang yang fisik dan yang virtual itu sebanyak 26 orang. Jadi totalnya 48 dan ini jumlah yang cukup besar sesuai dengan fraksi telah hadir 9 orang fraksi. Maka sesuai dengan Tata Tertib Pasal 251 Ayat 1 kuorum telah tercapai atas persetujuan Ketua Baznas serta Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Acara rapat pada hari ini adalah.

1. Pengantar Ketua rapat.
2. Penjelasan Ketua Baznas mengenai
  - a. Evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020.

- b. Evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19.
  - c. Isu-isu aktual dan solusinya.
3. Tanya jawab
  4. Kesimpulan
  5. Penutup.

Apakah agenda rapat dapat disetujui ?

**(RAPAT: SETUJU)**

Selanjutnya kami mohon persetujuan kita akhiri rapat ini pada pukul 15:00 ya nanti kalau perlu di perpanjang kita perpanjang.

**Saudara Ketua Baznas yang kami hormati beserta jajarannya.**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua Baznas dan beserta seluruh jajarannya yang telah hadir memenuhi undangan kami. Agenda rapat hari ini adalah evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020; evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19 serta isu aktual beserta solusinya.

Agenda rapat ini penting selain sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI juga mengevaluasi capaian dan dampak pelaksanaan program dan anggaran Baznas tahun 2020 serta penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau di kenal dengan Undang-Undang MD3 yang telah di ubah beberapa kali dan terakhir Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 98 ayat 3 huruf A menyebutkan bahwa tugas komisi di bidang pengawasan antara lain melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang termasuk APBN serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya.

Mengenai evaluasi kinerja dan anggaran tahun 2020 adalah mengacu kepada anggaran yang dialokasikan untuk Baznas. Anggaran dari APBN yang di alokasikan untuk bantuan operasional Baznas tahun 2020 melalui Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar 8 Miliar. Selain dari APBN anggaran program Baznas juga berasal dari pengelolaan zakat. Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII tanggal 19 November 2019 Baznas menyampaikan bahwa Baznas optimis tahun 2020 penghimpunan zakat akan tumbuh 24% sehingga penghimpunan zakat bisa mencapai 10,05 Triliun.

Anggaran yang di alokasikan untuk Baznas pada tahun 2020 ini harus di gunakan secara efektif dan efisien sehingga pelaksanaan program yang direncanakan menghasilkan capaian dan dampak sebagaimana yang diharapkan termasuk pelaksanaan bantuan sosial untuk penanggulangan dampak Covid-19.

Pandemi Covid-19 selain berdampak penurunan pertumbuhan ekonomi juga berdampak sosial dan tumbuhnya angka kemiskinan baru atau misbar. Program sosial yang di laksanakan oleh Baznas diharapkan tepat

sasaran, sehingga dapat membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Oleh karena itu pada rapat kali ini Komisi VIII DPR RI ingin mendapatkan penjelasan sebagai berikut:

1. Berapa realisasi anggaran Baznas untuk mendukung pelaksanaan program pada tahun 2020? Dan apa indikator dan dampak yang di hasilkan baik indikator tersebut secara kuantitatif maupun secara kualitatif?
2. Bagaimana pengelolaan program bantuan sosial yang di lakukan oleh Baznas anggaran yang dialokasikan berapa dan bagaimana proses penyaluran serta siapa menjadi target sasarannya? Pengelolaan program bantuan sosial Baznas harus transparan dan menggunakan mekanisme yang sederhana dan berdasarkan data yang akurat sehingga pelaksanaannya cepat, tepat, sasaran, dan dapat dipertanggung jawabkan.
3. Apa tantangan yang dihadapi Baznas dalam melaksanakan anggaran dan program tahun 2020 termasuk program bantuan sosial penanggulangan Covid-19 serta bagaimana penanganan Baznas terhadap isu-isu aktual mengenai zakat baik yang terkait dengan regulasi kebijakan dan teknis pelaksanaannya?

#### **Hadirin yang kami hormati.**

Demikian pengantar dari Pimpinan kami sampaikan selanjutnya sesuai dengan acara yang telah di sepakati kami persilakan kepada Ketua Baznas untuk menyampaikan penjelasannya di persilakan.

#### **KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang kami hormati para Pimpinan Komisi VIII DPR RI.**

**Yang kami hormati para Anggota Komisi VIII DPR RI.**

**Seluruh teman-teman dari Baznas dan Anggota dan seluruh jajaran Direksi serta semua Amilin dan Amilat yang bisa menyertainya.**

Saya akan memaparkan evaluasi kinerja dan anggaran Baznas RI tahun 2020. Saya memulai dengan kinerja realisasi penggunaan dana APBN. Dana APBN Pagunya adalah 8 Miliar ya. Kemudian melalui revisi kita mengalokasikan untuk penggunaan untuk penanganan Covid-19 ya. Sehingga total sisanya adalah Rp.7.275.310.000. Kemudian dari sisa yang 7.2Miliar itu sudah terealisasi Rp.2.563.895.051. Sehingga saldonya tinggal Rp.4.711.414.449 atau saldonya tinggal 35% ya. Dengan rincian seperti yang di bawahnya itu. Ya untuk sosialisasi pergerakan zakat melalui iklan di media cetak nasional itu saldonya masih utuh ya, sehingga sisanya itu saldonya masih 100%.

Kemudian *focus gorup discussion* sosialisasi sistem pemerintah berbasis elektronik ya, belanja bahan itu masih utuh, belanja jasa profesi juga masih utuh ya. Kemudian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota ya itu juga masih utuh ya. *Monitoring* dan evaluasi Badan Amil Zakat Nasional

provinsi dan kabupaten/kota ya pagunya adalah Rp. 265.434.000 terealisasi Rp.164.850.000 sehingga sisanya masih Rp.100.564.000.

Perjalanan dinas Pimpinan, Sekretariat dan Anggota Baznas dalam pembinaan Baznas Provinsi dan kabupaten/kota pagunya Rp.282.064.000 terealisasi Rp.112.485.647 masih ada sisa Rp.169.578.353.000. Jasa audit 120 Juta masih saldonya 120Juta.

Kemudian konsinyering perencanaan RKAT RKA K/L tahun 2021 ya, itu masih apa masih belum terpakai karena belum dilaksanakan kegiatannya. Kemudian konsinyering penyusunan SPJ dan laporan keuangan Sekretaris Baznas tahun 2020, ini juga masih utuh ya. Pengadaan kendaraan dinas roda 4 Eselon II, pengadaan kendaraan operasional kendaraan roda 4 Eselon III, dan kendaraan operasional Sekretariat Baznas roda 2 975 Juta itu baru terealisasi sehingga masih 40 Juta sehingga masih 935Juta. Pengadaan laptop dan pengadaan komputer PC dan printer Rp.40.751.000 pagunya, realisasinya baru Rp.39.500.000 sehingga masih ada sisa Rp.1.001.000. Belanja modal peralatan dan mesin pengadaan lemari arsip kayu, pengadaan file kabinet 4 pintu, dan pengadaan kabinet lemari arsip Rp.30.850.000 realisasinya baru Rp.12.980.000 sehingga sisanya masih Rp.17.870.000.

Yang nomor 14, honorarium satpam pengemudi kebersihan anggarannya Rp.527.930.000 realisasinya Rp.241.800.000 sehingga saldonya masih Rp 281.130.000. Biaya kirim bukti setor dan laporan donasi muzaki anggarannya 60 juta terealisasi Rp.11.859.300 masih tersisa Rp 88.140.7000. Belanja honor operasional satuan kerja Rp.105.980.000 terealisasi Rp.39.390.000 masih ada sisa Rp.66.570.000, percetakan buku kompilasi peraturan perundang-undangan pengelola zakat ini Rp.31.602.000 masih utuh.

Operasional kantor Rp.191.520.000 terealisasi ... masih Rp. 141.583.300. Kemudian belanja langganan listrik Rp.1.560.000.000 terealisasi Rp. 177.987.225 sehingga sisanya masih Rp1.382.012.075. Belanja langganan telepon Rp.360.000.000 terealisasi hanya Rp.4.133.088 Sisanya masih Rp.355.866.915. Belanja langganan air 90 Juta terpakai Rp. 547.594 masih sisa banyak Rp.89.452.406. Belanja langganan internet 420 juta terealisasi Rp.233.200.000, masih ada sisa Rp.186.800.000. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin Rp.149.180.000 terpakai baru Rp.2.730.000 sehingga sisanya masih banyak Rp.146.450.000, belanja sewa Rp1.514.280.000 sudah terpakai Rp1.000.415.676 masih ada Rp.98.604.000

Selanjutnya kami paparkan grafik realisasi pengumpulan ZIS Nasional mulai dari tahun 2002-2019 ketika waktu itu ketuanya masih Almarhum Pak Ahmad Supriyanto. Kemudian dilanjutkan dengan periode Ketua Umum Ustadz Profesor Didin Hafidhuddin dari 2005-2015. Kemudian periode kami mulai 2015 hingga 2019 dan juga perkiraannya nanti tahun 2020. Kami memulai dengan tahun 2015 itu nasional itu bisa mengumpulkan 3.65 triliun. Tahun 2019 itu terkumpul 10.22 triliun dan insyallah tahun 2020 targetnya adalah 12.48 triliun.

Lanjut, berikut ini adalah target dan realisasi pengumpulan oleh Baznas pusat dari bulan Januari sampai bulan Juni 2020. Januari targetnya

20,3 miliar realisasinya 20,3 miliar lebih sedikit. Februari 18,584 targetnya dan realisasinya adalah sama. Maret Rp.20.955.272.583 bisa terealisasi sama. April Rp.39.274.362.707 bisa terealisasi sama. Mei 113 ini mulai melonjak karena Mei ini mulai memasuki bukan puasa targetnya Rp.113.380.606.191 realisasi lebih sedikit yaitu Rp.113.381.653.552. Bulan Juni targetnya 27 miliar dan capaiannya adalah Rp.28.085.524.466. Sehingga kalau di total targetnya sampai akhir bulan Juni adalah Rp.239.236.280.474 realisasinya adalah Rp.240.399.699.301. Selanjutnya adalah itu tadi kalau disajikan grafik adalah seperti yang tampak di layar itu alhamdulillah itu selalu targetnya bisa melampaui.

Komposisi realisasi pengumpulan ZIS berdasarkan jenis saluran donasi ini oleh Baznas pusat ya. Paling besar itu 34,6% itu oleh UPZ Unit Pengumpulan Zakat. Kemudian Nomor 2 adalah pengumpulan retail yang bisa menyumbang 25,2%. Kemudian pengumpulan digital ini bisa mencapai 23,9%. Alhamdulillah pengumpulan digital ini dari tahun ke tahun terus membaik ya. Kita perkirakan nanti sampai akhir tahun ini bisa melampaui 25% dari seluruh pengumpulan. Kemudian CSR itu ada 12%, zakat perusahaan 2% dan zakat perorangan itu ada 2,3%

Kemudian realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS oleh Baznas pusat dari Januari ke bulan Juni. Program, ada 5 program yaitu program sosial, program pendidikan, program kesehatan, program dakwah, dan program ekonomi dengan total pendistribusiannya program sosial 74,8 miliar; program pendidikan ya dengan jumlah mustahiq 246.214; program pendidikan 14,295 miliar dengan mustahiq 21.743; program kesehatan 24.137 miliar dengan mustahiq 193.749. Program dakwah 10,644 miliar dengan jumlah mustahiq 87.515; program ekonomi 15,378 miliar dengan jumlah mustahiq 75.814. Total yang sudah disalurkan untuk pendistribusian dan pendayagunaan di luar ini penyaluran untuk AMIL adalah 139,224 miliar mustahiqnya 625.034 orang.

Ini grafik kinerja realisasi pendistribusian dan pendayagunaan ZIS Baznas pusat ya totalnya adalah 139,04 miliar paling banyak itu program sosial 53,6%. Kemudian yang berikutnya adalah program ekonomi; program kesehatan itu menyerap 17,2%. Selanjutnya program ekonomi menyerap 11,1%; program pendidikan itu 10,3% ya; kemudian program dakwah 7,7%.

Berikutnya adalah info grafik program pendistribusian penyaluran oleh Baznas Pusat ya. Seperti yang tergambar disitu adalah untuk layanan keuangan mikro mustahiq. Jadi sebarannya adalah di 27 provinsi, 74 kabupaten/kota, 92 kecamatan dan 108 desa.

Selanjutnya adalah pemberdayaan peternak mustahik. Ini tersebar di 5 provinsi, 26 kabupaten/kota dan dengan mustahik 27.965 KK. Selanjutnya adalah rumah sehat Baznas. Jadi rumah sehat Baznas ini adalah klinik gratis untuk fakir miskin. Itu tersebar di beberapa tempat, ada di Jakarta, ada di Jogja, ada di Sidoarjo, kemudian di Makassar, ada juga di Pangkal Pinang, kemudian ada juga di Sulawesi tengah di Parkimotong ya dan ini ya tentu juga di Jakarta ini adalah pelayanan kesehatan gratis untuk fakir miskin.



Selanjutnya evaluasi umum kinerja realisasi Baznas pusat Januari sampai Juni 2020 ya. Pengumpulan ZIS di era Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 46% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yaitu bulan Januari sampai Juni dikarenakan persiapan Baznas dalam mengantisipasi pengumpulan melalui digital.

Yang kedua pendistribusian dan pendayagunaan di era Covid-19 mengalami kenaikan sebesar 129,82% dari jumlah dana yang tersaur dan 87,42% kenaikannya dari jumlah mustahik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Anggaran APBN sebesar 8 miliar digunakan untuk Covid-19 sebesar Rp.724.690.000 sehingga totalnya anggaran APBN adalah Rp.7.275.310.000. Realisasi APBN digunakan untuk kebutuhan rutin operasional sebesar Rp.2.563.895.551 atau 35,32% selama Januari sampai Juli penyerapan anggaran APBN belum optimal di sebabkan oleh adanya kebijakan BDR atau bekerja dari rumah yang mengakibatkan pengurangan biaya operasional termasuk tidak adanya biaya perjalanan dinas.

Selanjutnya kami paparkan evaluasi kinerja dan anggaran penyaluran program sosial penanggulangan dampak Covid-19. Lanjut, ini adalah kinerja realisasi penanganan pandemi Covid-19 oleh Baznas dan LAS seluruh Indonesia. Jadi ini seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia, tersebar di 31 provinsi 32 ya, 32 provinsi dengan dana 296,07 miliar. Dan ini baru 24,2% data yang masuk. Jadi data yang sebenarnya sebetulnya jauh lebih besar dari itu karena pelaporan oleh Baznas daerah baik provinsi maupun daerah kabupaten/kota maupun LAS ini masih dalam proses pelaporan sehingga kami belum bisa melaporkan keseluruhan. Jadi alokasi yang sebenarnya itu tentu jauh melampaui 296,07 miliar.

Kinerja realisasi program darurat kesehatan promotif Covid-19 nasional ya. Ada untuk penyemprotan desinfektan di 7.108 lokasi dengan total dana 1,44 miliar, dukungan logistik 136.678 pcs ya dengan total dana 55,5 miliar, pembagian sajadah ini di daerah yang ada pembagian sajadah ini 1.815.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Pak Ketua ini itu maksudnya semua dari Baznas atau dari LAZ-LAZ yang lain?

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Ini ada Baznas provinsi maupun Baznas kabupaten/kota maupun daerah yang melapor. Ini baru 24.2%. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah barangkali bisa menjadi 4 kali lipatnya. Ini yang sudah melapor seperti ini yang bisa kita laporkan sekarang.

Kemudian untuk edukasi masyarakat ya terjadi di 1.254 lokasi dengan anggaran dana sebesar 199,52 juta. Pembagian masker, masker yang

dibagikan sebanyak 297.927 buah masker dengan dana 3,31 miliar. Wastafel sehat ada 945 unit wastafel sehat dengan dana 683,11 juta. Cuci karpet masjid terjadi di 91 lokasi dengan dana 24,47 juta. Pembagian *hand sanitizer* banyaknya adalah 50.720 botol ya dengan dana 801.013.000 ... Dan program lainnya jadi 5.449 lokasi ya atau ini bias lokasi, bisa jiwa, bisa buah juga dengan total dana Rp.313.053.000.000.

Selanjutnya, ini juga ada pembangunan ruang isolasi. Ada 7 unit ya dengan dana 38,45 juta. Layanan jenazah ada 51 jenazah ya yang terdampak Covid yang dibantu dengan dana 18,37 juta. Pelayanan kesehatan untuk 6.695 jiwa dengan dana 2,93 miliar, dukungan APD, APD ini ibaratnya 33.792 paket. Dananya cukup besar 66,3 miliar. Ambulan siaga dan *rescue* ada 13 unit dengan dana 607,75 juta. Kemudian juga ada x-ray, ventilator dan lain-lainnya di 2.377 lokasi ya dengan dana 8,54 miliar.

Selanjutnya halaman berikutnya adalah bantuan tunai mustahik. Jadi ini bantuan tunai yang untuk 236.685 KK dengan dana 43,62M miliar cukup besar ini. Bantuan sembako untuk 690.577 KK dengan dana 64,36 miliar, cash for work. Jadi kita memperkerjakan mereka yang karena pandemi Covid itu kemudian semacam kehilangan pekerjaan itu. Kemudian mereka kita pekerjakan untuk membantu menyalurkan program-programnya Baznas ya. Itu bisa kita bisa membantu 4.632 keluarga dengan dana 985,58 juta. Makanan siap saji untuk 1.346.463 jiwa dengan dana 2,44 miliar dan program lainnya di 8.080 lokasi dengan dana 2.83 miliar.

Selanjutnya adalah realisasi penanganan pandemi Covid di Baznas pusat, kalau dilihat alokasinya itu adalah 62% itu adalah untuk darurat kesehatan, kemudian darurat sosial ekonomi itu 70% sementara untuk menjalankan program yang *existing* itu hanya 4%. Jadi selama pandemi ini betul-betul kita konsentrasikan penyaluran itu lebih banyak untuk mereka yang terdampak Covid-19 baik karena kesehatannya ataupun karena dampak sosial ekonominya.

Kemudian kami laporkan juga kinerja realisasi kerja-sama Baznas dengan BPKH. Jadi BPKH cukup banyak meminta dukungan kepada Baznas untuk menyalurkan dana-dana kemaslahatan yang jumlahnya itu sampai dengan bulan Juni itu mencapai Rp.16.559.209.600 dan itu di pakai untuk dukungan APD nilainya Rp.5.439.512.600. Kemudian untuk pengadaan ventilator dan mobil x-ray Rp.2.284.000.000. Paket logistik keluarga Rp.1.436.300.000. Bantuan langsung tunai ini ada Rp.7.399.450.000. Jadi saya kira itu yang bisa kami laporkan mengenai kinerja ya Baznas baik Baznas pusat maupun Baznas ataupun LAZ secara nasional yang bisa kami laporkan kepada Komisi VIII. Demikian waktu kami kembalikan.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Kalau isu-isu aktual tidak dibaca Pak?

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Agenda tiga isu-isu aktual itu adalah yang pertama mendorong zakat ASN untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 dalam jangka panjang. Nah ini memang sekarang itu sedang dalam proses penerbitan Perpres ya, Perpres untuk zakat ASN. Kita harapkan kalau ini apa Perpres ini terbit maka pengumpulan zakat dari ASN akan lebih baik. Ini kita harapkan bisa menggantikan apa itu Inpres 3 Tahun 2014 dulu yang diterbitkan oleh Presiden SBY.

Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menurut evaluasi kami sudah saatnya itu untuk di amandemen karena ada beberapa kelemahan. Kelemahan yang pertama adalah bahwa ketika kita menghitung tentang potensi zakat secara impresi. Itu selalu kita dan tidak pernah ditemukan bahwa itu diasumsikan bahwa zakat itu sudah wajib sehingga potensinya menjadi besar.

Tapi kenyataannya kan zakat itu belum wajib. Bahkan undang-undang sebelumnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 yang di terbitkan pada zamannya Presiden Habibie itu malah lebih tegas ya yang menyatakan bahwa apa muslim yang sudah katanya masuk nisab itu wajib membayar zakat. Tapi di UU 23 Tahun 2011 itu kewajiban berzakat itu malah tidak ada. Sementara kalau kita menghitung potensi itu ada asumsi implisit bahwa itu sudah wajib begitu padahal kenyataannya belum. Maka kami melihat bahwa sudah saatnya Undang-Undang ini *diupgrade* untuk menjadikan zakat itu menjadi wajib yang nanti itu pelaksanaannya secara bertahap. Kita mulai dulu dengan apa wajib kepada pihak pada tingkat zakat individu itu pada aparatur negara sebagai contoh itu yang wajib.

Kemudian pada tingkat zakat perusahaan kita mulai dengan BUMN. Kenapa BUMN? Karena itu BUMN dan BUMD itu kan milik negara dan negara ini 87% lebih itu adalah muslim sehingga sebenarnya pemilik sumber dananya daro BUMN BUMD itu adalah lebih dari 87% nya itu adalah muslim. Sehingga sangat masuk akal ketika kemudian apa BUMN BUMD itu membayar zakat atas keuntungannya.

Nah kemudian yang juga bisa dimulai pada tahap pertama itu wajib ya itu perusahaan-perusahaan yang syariah perbankan syariah, asuransi syariah perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Syariah misalnya atau perusahaan-perusahaan yang menginginkan sertifikasi halal. Untuk halal betul itu mestinya juga ada bukti bahwa hartanya sudah di sucikan dari kewajiban berzakat. Maka yang seperti itu bisa diwajibkan terlebih dahulu untuk. Kemudian nanti pada tahap berikutnya adalah untuk masyarakat luas dan untuk perusahaan-perusahaan yang lain dan itu cukup di atur di dalam PP. Jadi ide besar untuk itu mengenai wajib zakat.

Nah untuk mengurangi resistensi masyarakat dengan diwajibkannya zakat maka perlu insentif pajak. Yaitu bahwa selama ini sudah ada insentif pajak, pajak yang dibayarkan kepada Baznas dan LAZ resmi itu bisa di pakai

untuk mempengaruhi penghasilan kena pajak. Ternyata ini tidak begitu menarik tidak banyak yang memanfaatkan fasilitas ini.

Maka kami mengusulkan itu kita tiru saja apa yang dilakukan di Malaysia yaitu bahwa zakat yang di bayarkan kepada Baznas dan LAZ itu bisa mengurai langsung kewajiban pajaknya. Apa yang terjadi di Malaysia yaitu bahwa ketika zakat itu wajib dan kemudian apa zakat itu bisa mengurangi kewajiban pajak yang terjadi adalah penerimaan negara dari pajak penghasilan itu tidak turun tetapi penerimaan negara dari zakat itu kemudian melonjak drastis sekali. Jadi ini memang perlu kita bicarakan dengan Kementerian Keuangan ya agar mereka juga bisa mendukung tapi saya yakin Ibu Menteri Keuangan yang sekarang ini Bu Sri Mulyani kan Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam ya mestinya beliau mempertimbangkan untuk mendukung amandemen yang seperti itu.

Kemudian hal lain yang di dalam amandemen yang perlu dibenahi adalah hubungan antara Baznas pusat dan Baznas daerah itu tidak jelas sekarang itu. Kenapa pelaporan dari Baznas daerah itu sangat buruk? Karena salah satunya penyebabnya itu karena Baznas daerah itu tidak jelas hubungannya antara Baznas kabupaten/kota dengan Baznas provinsi hubungannya tidak jelas dengan demikian hubungannya dengan Baznas pusat juga tidak jelas. Kami kan hanya memberikan pertimbangan saja ketika pemilihan apa Peminan Baznas di daerah itu.

Kemudian yang mengangkat dan memperhatikan Pimpinan Baznas di daerah itu adalah kepala daerah begitu dan kenyataannya sekarang ini ya kepala daerah juga tidak pengawasnya tidak begitu sangat tergantung pada sebetulnya tergantung kepada kepala daerahnya ya. Seperti misalnya Pak Ridwan Kamil perhatiannya kepada Baznas Provinsi Jawa Barat sangat bagus. Pak Ganjar Pranowo perhatiannya kepada Baznas Jawa Tengah sangat bagus dan karena itu kinerjanya juga sangat bagus kemudian. Tapi banyak sekali yang tidak memperhatikan itu juga sampai kepada pelaporan ya maka Baznas daerah ini juga tidak memenuhi sudah ada diatur dalam peraturan perundangan dan juga dalam PP 14 Tahun 2014 ya. Itu sudah di atur bagaimana pelaporan itu tetapi kenyataannya sampai sekarang ini pelaporannya menjadi masalah besar ya. Sehingga kami kesulitan untuk melaporkan secara keseluruhan ya mengenai kinerja Baznas daerah maupun LAZ.

Saya kira itu garis besarnya sehingga hubungan antara Baznas pusat Baznas daerah itu perlu ditata ulang ya supaya lebih jelas mereka itu bertanggung jawab kepada siapa. Kemudian saya kira isu lain di dalam amandemen undang-undang itu. Ya? Apa? Ah iya. Jadi sekarang ini kan mestinya Baznas Pusat itu untuk biaya operasional itu kan bisa diambil dari Hak Amil maupun dari APBN. Jadi Baznas daerah itu di samping Hak Amil kirain alokasi dari APBD. Nah ini kenyataannya ada yang dari pusat itu apa dukungan APBN-nya sangat terbatas yang di daerah juga apa itu sangat terbatas. Sehingga usulan kami ya lebih baik saja kalau Baznas daerah itu struktural di bawah Baznas pusat. Kemudian Baznas pusat itu menjadi bagian anggaran dimana Ketua Baznas itu adalah apa namanya pengguna anggaran. Jadi jelas itu pengguna anggaran mengenai apa menjadi bagian

anggaran dan menjadi pengguna anggaran ya. Sehingga penganggarnya tidak lagi sangat bergantung kepada alokasi di Kementerian Agama. Dengan demikian juga apa di Baznas di daerah itu juga bisa mendapatkan alokasi dari APBN. Saya kira itu secara garis besar mengenai amandemen undang-undang.

Kemudian yang ketiga mendorong Kemendagri untuk menerbitkan Peraturan Menteri APBD untuk Baznas kabupaten dan Baznas kota karena ini masalah klasik. Sampai sekarang itu kenyataannya pengalokasian Baznas di daerah APBD untuk Baznas di daerah itu tidak berjalan dengan baik dan on and off dan apa kadang iya kadang tidak, apa lagi sekarang dengan pandemi Covid ini banyak sekali APBD yang tidak dialokasikan lagi kepada Baznas provinsi maupun Baznas kabupaten/kota. Jadi secara umum itu saya kira mengenai isu-isu aktual. Waktu saya kembalikan.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ya terima kasih. Terima kasih Pak Ketua Badan Amil Zakat Nasional Bapak Prof. Bambang Sudibyo. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan rapat kita maka kami persilakan kepada anggota untuk menyampaikan pandangan tanggapan dari sebelah kanan saya ada Pak Husni, Pak Satori, Pak Nurhadi, Bu Lisda, Pak Nurhasan Saidi. Saya kira hampir semuanya ya saya nanti akan gilir saja. Pertama kali saya persilahkan kepada Pak Husni.

**F- PARTAI GERINDRA (M. HUSNI, S.E., M.M.):**

Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan Komisi VIII.**

**Yang saya hormati teman-teman Komisi VIII baik yang hadir secara fisik maupun virtual.**

**Yang saya hormati Pimpinan Baznas Republik Indonesia dan seluruh jajarannya.**

Berbicara tentang Baznas adalah berbicara sesuatu yang tidak populer. Dana umat sampai hari ini terkumpul sangat sedikit sekali. Tadi apa yang Bapak sampaikan dari Januari sampai Juni telah terkumpul 240 miliar. Itu kalau kita bagi rata-rata dengan 200 juta penduduk di republik ini itu hanya kita dapatkan Rp.2.400 per orang. Itu Pak lebih mahal ongkos parkir di Medan itu Pak.

Kemudian juga untuk nilai 240 miliar saya rasa itu sangat kecil sekali ya. Di sini pengumpulannya juga kurang bagus penyalurannya juga kurang bagus. Dari Januari sampai Juni terkumpul 240 miliar yang dikeluarkan itu 139 miliar berarti ada sisa 101 miliar lebih kurang 42% itu mandek ya. Karena mestinya Lembaga Baznas yang penduduk Indonesia ini muslimnya terbanyak di dunia itu terdiri pada orang-orang yang profesional. Saya tahu

Pak Profesor itu pintar, ya profesional. Yapi juga harus di imbangi ahli-ahli *marketing* yang handal; ahli-ahli perbankan; ahli *manager*; manajemen inventasi dan lain sebagainya.

Pak Ketua Baznas sama-sama kita tahu ini Pak tahun 2020 ini orang Pak investasi bodong saja yang katanya bunganya 12% dikejar ramai-ramai ya saya tak sebutkan perusahaannya apa-apa saja tentunya Bapak lebih tahu. Tapi Pak ini investasi surga ini Pak. Investasi surga ini. Orang bayar zakat dikenakan wajib 2.5% tapi kenapa orang tidak melirikinya? Ya.

Jadi masyarakat Republik Indonesia ini kan terdiri dari banyak hal banyak segmen apa yang salah di sini? Orang bilang ini ada *something wrong*. Juga apabila banyak mengeluarkan pengeluaran-pengeluaran jangan apa diletakan pada suatu tempat yang besar misalnya ini untuk masjid 1 miliar, 2 miliar. Jadi lebih bagus banyak dibagi ke tempat-tempat. Karena berbicara tentang Baznas tentunya kita berbicara tentang sebuah kepercayaan daripada masyarakat, kepercayaan dari masyarakat muslim untuk meletakkan dananya/zakatnya di lembaga resmi seperti Baznas ini. Jadi jangan kalau di tempat saya ini Pak ada bangun gedung hasi Baznas. Dulu ini lebih parah lagi Pak Ketua, beli kebun sawit Pak mereka Sumatera Utara ya. Jadi isinya apa kebun sawit itu keluarganya anaknya menantunya, habis itu kebun sawit itu tidak jelas rugi lagi berapa kali kena kita?

Kemudian lagi ya di sini ingin juga kami sampaikan kita ini selaku mitra kerja Baznas dengan Komisi VIII ini juga saya lihat dari hasil-hasil catatan yang saya lihat, kinerja realisasi penggunaan dana APBN. Belanja listrik Rp.1.000.560.000 itu berarti rata-rata satu bulan habis 130 juta. Kadi hal-hal seperti ini tidak perlu saya pikir tidak usah lah dianukan ya.

Kemudian lagi dikatakan target dan realisasi pengumpulan Baznas pusat Januari sampai Juni 2020. Ini macam anu saja Pak malaikat mau nulis saja ini targetnya sama realisasi bisa sama. Ini saya pikir luar biasa ini. Kita sama-sama ekonom ini Pak Ketua. Ini jarang terjadi seperti ini. Jadi tolonglah lebih kelihatannya ini yang sudah jelas-jelas saja. Misalnya potong gaji dan lain sebagainya. Tidak ada suatu upaya apa pun untuk mencari dari luar ini.

Kemudian lagi saya juga melihat komposisi realisasi pengumpulan zakat/infak/sedekah berdasarkan jenis saluran donasi ya sangat kecil sekali dari perusahaan maupun zakat *payroll* itu hanya 4.3%. Jadi orang-orang profesional dia pintar ini menggali ini. Karena sebetulnya potensi yang paling besar adalah di zakat perusahaan itu sendiri. Kemudian lagi tentang penyebaran-penyebaran pendistribusian dan penyaluran Baznas pusat ya itu kita ini mitra Pak. Tolong nanti kalau ada di daerah Dapil kami masing-masing tolong dibuat sebuah diingatkan sebuah kerja sama dan lain sebagainya. Supaya kita juga dari Komisi VIII bisa melaksanakan fungsi daripada pengawasannya. Jadi jangan jalan sendiri-sendiri.

Kemudian lagi saya juga melihat kinerja realisasi program darurat kesehatan promotif Covid-19 nasional. Pembagian sajadah itu sajadahnya berarti Rp.17.000 satu potong. Saya pengusaha tekstil Pak saya tahu betul ini sajadah seperti apa Rp.17.000 itu ya. Ya sudah paham itulah Pak Kiai itu kan? Jadi kalau mau berikan, berikanlah yang memadai dan bagus.

Kemudian lagi kalau Pak Ketua yang terhormat, Pimpinan Komisi VIII ini kalau Baznas ini dia kerja betul-betul dana umat Islam ini bisa dikelola betul-betul kita ini kemarin yang hadir wakilnya ya kan? Seorang wakilnya dia berani memberikan tantangan untuk kita. Hari ini ada ketuanya kita berikan tantangan kepada mereka bahwa silakan apalagi Pak Profesor Bambang Sudibyo ini Mantan Menteri Keuangan Pak ya? Bapak amat dan sangat pintar sekali bagaimana cara mengumpulkan dana-dana umat ini. Tinggal mungkin masalah undang-undang dan lain sebagainya kalau perlu dukungan Komisi VIII kita akan mendukung. Karena di sini jelas kalau memang kita bisa seperti negeri-negeri yang lain memaksimalkan tentang pendapatan zakat dan infaq ya, Pak Ketua. Kita tantang ini Pak Profesor Bambang Sudibyo mampu tidak mereka akan tahun depan membangun yang namanya bank zakat dan infak? Itu mudah terealisasi Pak, asalkan memang ada kemauan dan kerja keras dari Baznas ini sendiri. Jadi kalau ini sempat terjadi Pak Ketua sejarah ini buat kita Komisi VIII ini. Ini sejarah betul-betul untuk Komisi VIII dan apakah hal itu mustahil, sangat tidak mustahil.

Saya rasa itu saja Ketua. Saya akhiri mudah-mudahan Baznas ke depan lebih disayang oleh masyarakat, transparan dan akuntabel kuncinya.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak, Pak Husni ini Dapil Sumatera Utara tapi asalnya orang Aceh Pak. Selanjutnya Bapak Nurhadi dari Fraksi Nasdem silakan Pak.

**F- PARTAI NASDEM (NURHADI, S.PD) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi VIII dan juga;**

**Bapak Profesor Bambang Sudibyo selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional.**

Ada beberapa poin yang saya pelajari Pak dari evaluasi realisasi penggunaan APBN di semester pertama ini Januari sampai Juni 2020. Kaitannya ini dengan target di 2020 ini Bapak menargetkan 12,48 triliun untuk realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah nasional. Nah ini nanti saya minta penjelasannya pada tutup bulan Juni kemarin sudah 50% atau belum Pak? Karena ini kaitannya dengan adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain kenapa Bapak masih belum menggunakan anggaran yang tersedia untuk sosialisasi pergerakan zakat melalui iklan media cetak nasional dan media online nasional sebesar Rp.239.000.000 sekian? Padahal menurut saya ini

penting agar memacu penerimaan zakat semakin meningkat apalagi di masa pandemi Covid-19 seperti ini untuk membangkitkan empati masyarakat.

Kemudian yang kedua, saya mengapresiasi dan sangat mendukung tadi pada isu-isu aktual Bapak menyampaikan akan usulan adanya amandemen atau perubahan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pak ya? Yaitu usulan kongkretnya adalah bagi yang sudah membayar zakat ini ada semacam *reward*-nya. Yaitu dengan mengurangi kewajiban membayar pajak walaupun nanti hasilnya ternyata pajak penghasilan yang diterima oleh negara ini tetap. Namun zakat yang terkumpul ini insyallah justru semakin besar ini saya sangat mendukung langkah ini. Mudah-mudahan dari fraksi yang lain juga mendukung. Demikian Pimpinan dari saya terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih Pak Nurhadi selanjutnya kami persilakan Pak Jefry Romdonny dari Fraksi Partai Gerindra.

**F- PARTAI GERINDRA (Dr. H. JEFRY ROMDONNY, SE., S.Sos., M.Si., M.M ) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII.**

**Dan juga yang terhormat Bapak Ketua Baznas beserta jajarannya.**

Dari paparan yang tadi sudah Bapak sampaikan saya mempelajari tadi target yang di capai hingga Juni tahun 2020 dalam kesempatan ini saya juga ingin juga mengetahui target-target di bulan-bulan yang berikutnya selanjutnya target sehingga target dalam 1 tahun di 2020 itu bisa tercapai. Kalau saya lihat tadi targetnya itu sebanyak 12 triliun itu bagaimana?

Kemudian terkait evaluasi umum di poin 1 menyebutkan bahwa pengumpulan zakat, infaq, sodhaqoh Januari hingga Juni 2020 mengalami kenaikan sebesar 46% dibanding periode yang sama di tahun 2019 yang di sebabkan ini dilakukan via digital. Fakta ini tentu sangat menarik mohon dijelaskan untuk pengumpulan zakat, infaq, sodaqoh via digital ini apakah baru tahun ini dikarenakan ada Covid-19 atau memang sudah ada sebelumnya? Saya kira pengumpulan zakat infaq sodaqoh ini vis digital adalah penyesuaian yang harus dikembangkan. Nah ini ... untuk kesadaran masyarakat untuk zakat, infaq, sodaqoh akan tersalur dengan baik via layanan digital.

Kemudian pertanyaan terakhir pada isu-isu aktual dan juga solusinya. Saya menyoroiti pada poin nomor 2 mungkin Bapak bisa menjelaskan poin-



poin apa yang harus dikuatkan sehingga perlu adanya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Demikian yang saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih Bapak Dr. Ustadz Dr. Jefry Romdonny. Selanjutnya Ibu Idah Syahidah dari Fraksi Golkar.

**F- PARTAI GOLKAR ( Dra. Hj. IDAH SYAHIDAH RUSLI HABIBE, M.H ) :**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.**

**Yang saya hormati Bapak Kepala Amil Zakat Nasional Bapak Bambang Sudibyo beserta jajarannya.**

Saya melaporkan Pak untuk zakat ASN ini untuk di Provinsi Gorontalo jauh sebelum adanya pandemi ini sudah dilaksanakan Pak. Jadi seluruh ASN yang di Provinsi Gorontalo itu dipotong 2.5% dan *alhamdulillah* sampai saat ini terus berlangsung. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kemaslahatan umat masih tetap berjalan sampai saat ini.

Kemudian ada satu yang saya tanyakan di sini Pak mengenai hasil rekomendasi Rakornas Baznas pada tanggal 11 Juni lalu, pada poin 5, 8 dan 9. Jadi di sini pada poin 5 bahwa Baznas RI, Baznas provinsi, Baznas kabupaten/kota berkomitmen memprioritaskan program penyaluran ZIS dan DSKL untuk upaya percepatan penanganan Covid-19. Kemudian pada poin 8 Baznas RI, Baznas provinsi, dan Baznas kabupaten kota berkomitmen untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terutama yang terdampak Covid-19. Kemudian pada poin 9 bahwa Baznas RI, Baznas provinsi dan Baznas kabupaten/kota dan LAZ berkomitmen untuk mengedukasi masyarakat dalam mempercepat penanganan Covid-19 ini.

Terkait dengan komitmen untuk memprioritaskan program penyaluran zakat, infaq, dan sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan mengedukasi sebagai upaya pencegahan penanganan Covid-19 ini bagaimanakah yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah pola atau sistem pemberian bantuan kebutuhan dasar masyarakat yang diterapkan sumber anggaran dan data yang dipakai sehingga kegiatan ini bantuan ini tidak bentrok dengan bantuan-bantuan dari lembaga lainnya? Kemudian serta bagaimana peran Baznas kabupaten kota dalam program penanganan pencegahan Covid-19 ini?

Selanjutnya pada halaman 8 target dan realisasi pengumpulan Baznas pusat pada bulan Februari sampai bulan April berapa angka realisasinya yang sebenarnya karena kalau dilihat angka target dan realisasinya sama persis pada bulan Februari targetnya Rp.18.584.126.549 realisasinya juga sama persis angka tersebut. Apakah benar realisasinya sehingga persis angka puluhannya? Mungkin ada kesalahan angka atau bagaimana mohon penjelasan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih Ibu Idah Syahida selanjutnya Bapak Kiai Nurhasan dari Fraksi PKS silakan Pak.

**F – PKS ( NURHASAN ZAIDI, S.Sos.I ) :**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah.**

**Pimpinan Komisi dan para Pimpinan Baznas serta rekan-rekan yang dirahmati Allah.**

Saya rasa apa yang di sampaikan beberapa teman atau perkembangan zakat ini sebetulnya sudah mengalami sebuah lompatan luar biasa setelah ada Undang-Undang Zakat. Tapi tentunya Undang-Undang Zakat ini pasti setelah kita coba uji kita lakukan setelah ada revisi pasti ada evaluasi bolong-bolongnya apa yang perlu disempurnakan kita sempurnakan. Terutama persoalan-persoalan yang sudah lama kita diskusikan masalah hubungan hierarki antara Baznas maupun daerah sehingga tidak optimal maupun persoalan zakat dan pajak ini kan perlu lobby-lobby dengan Kementerian Keuangan supaya bisa optimal sebagaimana Malaysia yang kita pelajari.

Namun saya lebih cenderung kepada sebelum itu yang ideal kita dapati walaupun Undang-Undang Zakat ini menjadi PR kita sebelum harapan Undang-Undang Zakat yang kita pelajari yang kita pahami yang sudah di undangkan, revisi juga satu kali. Tentu kita mengoptimalkan dengan undang-undang yang ada. Zakat ini kan masalah *trust*/kepercayaan amanah apalagi lembaga zakat yang bukan Baznas yang tidak dikelola oleh negara tidak dukungan negara itu memiliki pendapatan atau pemasukan zakat yang luar biasa dari Baznas. Sehingga beberapa catatan ini optimalkan dengan Undang-undang yang ada. Walaupun undang-undang yang ada sekarang ini perlu ada perbaikan-perbaikan. Memang zakat itu akan optimal manakala negara berperan. Kan kalau kita lihat peran zakat dan wakaf di negeri-negeri muslim itu sangat optimal. Kalau sekarang negara terus pajak diambilin sampai sepeda katanya mau dipajakkan ini kan apa bedanya dengan negara sebelum kemerdekaan kalau hanya mengandalkan pajak? Nah sehingga persoalan pajak ini menjadi catatan-catatan penting kita.

Beberapa catatan saya di sini juga ini Baznas ini punya sekolah dan pesantren untuk anak-anak yatim. Mudah-mudahan sekolah ini juga menjadi model ya yang harus menjadi model buat atau khusus anak yatim. Apa tidak kehilangan fokus begitu Baznas harus mengelola sekolah? Ini juga menjadi pertanyaan. Apalagi teman-teman sebelumnya mempertanyakan kan ini keahlian di Baznas ini bukan keahlian fiqih syariah tapi juga multidimensi karena ini Baznas ini zakat yang potensinya luar biasa harus punya keahlian *marketing, packaging*, dan lain-lain. Apalagi di era Covid saya baca dalam survey ini masyarakat kita ini kan masyarakat yang punya rasa *ta'awun* kebersamaan pelayanan yang luar biasa dan meningkat. Nah ini obyek dalam tanda petik konsumen yang dalam konteks bisnis kan ini juga dalam konteks bisnis zakat ini sebuah usaha dalam tanda petik yang tidak pernah akan rugi. Apalagi wakaf ini juga luar biasa ini persoalan BWI juga persoalan yang harus dievaluasi juga dengan *ring-ringan* keanggotaan yang 20 lebih ini juga unik juga apakah efektif. Ini juga bab lain ya?

Kemudian hal-hal lain yang menjadi catatan kami tentunya saya percaya dengan kelembagaan zakat ini. Ada beberapa seperti beberapa poin yang saya lihat persoalan lembaga zakat Baznas juga sudah memiliki gedung. Mudah-mudahan ini juga perlu. Kemudian efektifitas undang-undang zakat tadi disinggung oleh Pak Bambang juga sejauh mana yang harus kita evaluasi. Jadi ini catatan-catatan teman-teman lebih banyak akan memberikan masukan. Terima kasih Pak.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih selanjutnya Ibu Lisda selanjutnya Pak Satori.

**F – P NASDEM ( Hj LISDA HENDRAJONI, S.E., MMT. ) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VIII.**

**Yang saya hormati Ketua Baznas beserta jajaran.**

Pertama-tama saya mengapresiasi dan mendukung Baznas yang telah turut serta membantu penanganan penanggulangan Covid-19 dan tentu saya berharap kepada Baznas untuk terus dan betul-betul dapat menyalurkan secara efektif, efisien dengan prinsip transparan, dan akuntabel.

Untuk selanjutnya saya pernah membaca ulasan tentang hitung-hitungan betapa potensi yang sangat besar untuk Indonesia ini kalau semua orang itu betul-betul menunaikan kewajiban membayar zakatnya. Sampai-

sampai kita itu seluruh masyarakatnya bukan hanya cukup tapi makmur. Nah ini saya rasa betul-betul adalah bukannya memang ada di pundaknya daripada Baznas untuk bagaimana ini bisa terlaksana? Kalau tidak ini urusannya kan surga dan neraka juga Pak? Ada kewajiban kita yang tidak terbayar kenapa salahnya dimana? Sosialisasinya kurang sehingga masyarakat tidak tahu atau tahu tapi tidak mau bayar atau bagaimana?

Kalau misalnya untuk pegawai negeri kita bisa berkomunikasi dengan Mendagri. Seperti tadi disampaikan istri gubernur kebijakan itu ada di Kepala daerah. Saya juga, suami saya juga Bupati di Kabupaten Pesisir Selatan alhamdulillah peningkatan dari Baz itu baik sekali. Sampai berlipat-lipat saya kurang tahu ya berapa % peningkatannya tetapi selama kami kurang lebih 4 tahun di Kabupaten Pesisir selatan banyak sekali peningkatannya yang dapat dipergunakan untuk masyarakat baik itu beasiswa; bantuan orang sakit; bantuan rumah bedah; dan lain-lain yang memang sangat bermanfaat.

Nah artinya kebijakan dari pemimpin daerah itu sangat-sangat diperlukan. Sehingga saya berharap sekali dari Baznas dapat berkomunikasi dapat berkoordinasi apa pun namanya dengan pihak-pihak terkait kementerian terkait, sehingga kalau memang itu bisa kita dorongkan melalui peraturan perundang-undangan itu harus kita maksimalkan. Selebihnya juga dari pihak swasta. Kami ini Pak saya penggerak sosial di daerah kami. Kami mencari CSR ini, itu tidak dapat juga. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kenapa tidak sih kita wadahkan maksudnya secara apa global terpusat sehingga pembagian itu bisa merata. Tapi kalau kita sekarang mengandalkan proposal Pak misalnya saya minta bisa dapat. Ada yang minta belum tentu dapat ada yang minta ke sini dapat ke sana dapat 3 kali. Ada yang dapat juga cuma 1 kali. Jadi tidak merata. Kadang-kadang kita memberi bantuan kepada orang berlipat-lipat sementara ada juga yang tidak dapat seperti itu.

Sehingga saya berharap sekali bahwa komunikasi koordinasi dengan kementerian dan lain-lain didukung dengan perundang-undangan dan peraturan sehingga ke depannya dapat memudahkan Baznas dalam bagaimana dapat apa namanya orang-orang khususnya pegawai-pegawai itu juga dapat ada potongan yang bisa langsung dan juga kesadaran dari pada masyarakat untuk memenuhi kewajibannya.

Selanjutnya ini Baznas juga merupakan mitra kemaslahatan dari BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji. Saya pernah ada kita bantuan dari BPKH untuk dapil saya dan waktu itu mereka bilang bisa melalui Bazda ternyata orang dari Bazda itu tidak paham berarti tidak pernah atau bagaimana itu? Padahal dari BPKH itu banyak sekali Pak bantuan-bantuan yang bisa melalui mitra yaitu Bazda. Mah ini kenapa bisa *miss* begitu harusnya ini bisa dioptimalkan karena darimanapun kalau kita bicara Bapak tadi bilang dari APBD ya tidak semua daerah memang APBD-nya kuat. Jadi kalau kita cuma mengharap itu saya rasa masih kurang. Demikian mungkin Ketua, Pak Ketua Baznas saya berharap semua sehat dan dapat terus menjalankan amanah ini terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Selanjutnya Pak Satori siap-siap Pak Kiai Bukhori silakan.

**F- PARTAI NASDEM (SATORI, S.Pd.I., M.M.) :**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih seizin Pimpinan Komisi VIII.

**Bapak Ibu Anggota Komisi VIII DPR RI yang kami hormati.**

**Ketua Baznas Pusat Pak Bambang Sudibyo beserta jajaran yang kami hormati.**

Perkenalkan Pak nama saya Satori Pak semula di Komisi IX sekarang hijrah di Komisi VIII. Yang pertama saya mengapresiasi Pak kepada pengurus Baznas Pusat kalau kita lihat di target dan realisasi pengumpulan Baznas pusat dari Januari per Juni 2020 ini hasilnya memenuhi target. Ini mudah-mudahan bulan-bulan selanjutnya dan sampai di akhir tahun juga bisa terpenuhi targetnya Pak. Artinya selepas datanya sama atau tidak bagi kami yang jelas ini terpenuhi targetnya, baik target maupun realisasinya mengapresiasi Pak terima kasih.

Kemudian yang kedua saya terima kasih tadi disampaikan informasi dari Pak Ketua Baznas bahwa Badan Amil Zakat daerah itu sepertinya kurang apa namanya kurang menyambung informasi dan komunikasi antara Baznas daerah dan Baznas pusat. Sedangkan kalau kita lihat Pak Baznas daerah itu mohon maaf ini mungkin tidak terjadi di daerah lain. Tapi hanya saya lihat di daerah saya bahwa penggunaan Baznas daerah itu lebih banyak untuk daerah kepentingan kepala daerah Pak. Seperti dalam hal permohonan proposal-proposal untuk membantu masyarakat itu disalurkan melalui Baznas. Kemudian Baznas dipergunakan atau dimanfaatkan oleh kepala daerah tertentu dalam rangka kepentingan politis.

Oleh karena itu barangkali kalau Pak Ketua Baznas pusat ini bisa memberikan sebuah aturan seberapa persennya lah secara linier sehingga dari Baznas pusat sampai Baznas daerah itu ada aturan-aturan tertentu secara spesifik sehingga tidak dikendalikan oleh kepala daerah. Itu Pak Kepala Baznas karena tadi saya sampaikan begitu mendengar bahwa Baznas daerah memang Pak diambil dari zakat profesi; di ambil dari bahkan APBD juga dianggarkan tetapi di balik itu juga ada banyak kepentingan-kepentingan. Mohon barangkali Pak Kepala Baznas pusat bisa memberikan informasi dan masukan kepada Baznas daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penyaluran bantuan untuk di Baznas daerah itu.

Kemudian Pak Ketua Baznas apakah targetnya ini dengan Rp.239.306.280.474 ini target yang menurut kami masih kecil Pak. Mengapa masih kecil? Karena kita ini skalanya skala Baznas pusat yang harus ikut

memfasilitasi bantuan 34 provinsi. Apakah mungkin Baznas pusat bisa lebih ditingkatkan lagi targetnya Pak? Lebih di tingkatkan lagi dengan memberikan semacam ajakan, himbauan atau informasi kepada masyarakat baik melalui pemerintah pusat untuk ajakan-ajakan kepada para ASN yang ada di masing-masing institusinya agar lebih bisa ditingkatkan karena saya yakin Pak dengan kondisi Covid-19 ini banyak yang harus difasilitasi dan bantuan untuk masyarakat. Sementara untuk Baznas pusat ini targetnya menurut kami masih kurang Pak. Mungkin bisa lebih di tingkatkan lagi.

Kemudian selanjutnya Pak dengan kondisi Covid-19 ini, tadi saya lihat pemberdayaan ekonomi mustahik di semester pertama tahun 2020 data per 30 Juni 2020 itu senilai 5,3 miliar. Ini baru didistribusikan kepada 5 provinsi apakah lebih dibagi rata Pak kepada 34 provinsi yang lain sehingga merasakan provinsi yang lain itu Pak.

Kemudian Bapak Ibu apabila dilakukan perbaikan regulasi dan tata kelola zakat, maka zakat akan tumbuh lebih besar lagi dan sangat membantu dalam mengurangi kemiskinan terbukti pada saat pandemi Covid-19 sekarang sudah menyalurkan di 31 provinsi sebesar 296,7 miliar. Bagaimana Baznas menanggapi hal ini Pak Ketua Baznas? Terima kasih itu barangkali yang bisa kami sampaikan.

*Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ya terima kasih Pak Satori selanjutnya Pak Kiai Bukhori. Siap-siap Ibu Nur Azizah nanti setelah ini.

**F- PKS (K.H BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.):**

**Bapak Ibu sekalian yang saya hormati.**

**Ketua dan Anggota yang saya hormati.**

**Pak Ketua Amil Zakat Nasional Profesor Bambang Sudibyo dan seluruh jajaran.**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Langsung saja Pak saya pertama mohon maaf nanti kalau sampai pukul 3 saya harus meninggalkan bukan tidak ingin tapi ada rapat lain terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kelanjutan dari tadi pagi. Nanti seandainya saya tidak ada mohon di maafkan dan mohon tetap direspon apa-apa yang perlu direspon.

Yang pertama Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan terima kasih ini kepada Baznas dan khususnya dari lembaga ini ada Forum zakat ini forum zakat ada 108 organisasi pengelola zakat yang didalamnya juga ada Baznas

RI. Itu telah menyalurkan Rp.43.519.759.938 khusus berkaitan dengan penanganan Covid-19. Saya kira ini juga merupakan satu apa namanya inisiatif yang patut kita hargai dan kita dorong terus karena ada selain bahwa menunjukkan respons bahwa memang Lembaga Amil Zakat juga harus responsif ini terhadap segala yang dinamika yang terjadi.

Yang kedua saya mencoba membaca pola pikir dari pada Baznas ini melalui cara penggunaan anggaran Pak. Saya mencoba mungkin mudah-mudahan kalau salah coba diluruskan. Saya melihatnya jadi nampak seperti kehilangan visi begitu. Maksud saya begini, dari dana yang ada itu sebenarnya memang hampir tidak dipakai untuk bagaimana menyempurnakan tentang kelembagaan Baznas. Kalau saya melihat misalnya Baznas secara nasional maupun di dalamnya juga ada lembaga-lembaga amil zakat sampai sekarang ini di Indonesia belum sempurna tentang profil kelembagaannya. Jadi potensi zakat yang diperkirakan setiap tahun mencapai 50 lebih triliun itu sebenarnya belum tergapai artinya maksud saya step menuju ke sananya itu belum jelas. Padahal ada potensi di sana dan bahkan tadi sempat *ngobrol* sama Pak Ketua ketika misalnya harus masuk ke lembaga-lembaga perusahaan besar seperti BUMN dan seterusnya pasti lebih dari pada 50 triliun lebih. Karena hitungan 50 triliun lebih itu sekitar berkenaan dengan zakat perorangan. Kalau sudah masuk zakat perusahaan pasti jauh lebih besar bisa mencapai ratusan triliun. Nah maksud saya profil ini pasti ada target besar.

Nah Baznas sebagai *leading* sebagai *lead*-nya dalam mengelola lembaga zakat, saya sih berharap bisa memiliki gagasan-gagasan besar dan step-step yang jelas Pak menuju ke sana. Nah saya melihat di dalam penggunaan anggaran itu nyaris tidak menyentuh itu bahkan yang terbesar kaitan masalah kendaraan yang agak kurang etis lah saya sampaikan. Di sini misalnya ada 1,5 miliar atau hampir 1 miliar itu lebih kepada operasional yang sangat teknis, teknis dan pribadi. Jadi saya fikir seharusnya ini kami mengharap Baznas memiliki satu gagasan besar tentu dengan melibatkan semua *stakeholder* khususnya ya. Misalnya lembaga-lembaga khususnya yang punya pengalaman yang cukup banyak. Saya kira juga perlu diajak *discuss* terkait bagaimana sih perzakatan di Indonesia.

Nah kalau kemudian kita mengeluhkan tentang regulasi atau perundang-undangan bagaimana cara menempuhnya. Saya mengamati pertama-tama undang-undang ini dibuatkan begitu ada reformasi karena sempat ikut memberikan masukan-masukan waktu itu secara tidak langsung. Dan waktu itu Prof ini termasuk seingat saya termasuk penggagas poros tengah yang akhirnya mencuat begitu ya. Akhirnya beliau bisa menjadi Menteri Koordinator dan Menteri Keuangan salah satunya juga dari sana. Tapi saya berharap gagasan-gagasan brilian itu Bapak tuangkan kembali di sini Pak. Bagaimana supaya persoalan perzakatan di kita ini menjadi utuh? Nah berapa tahun itu persoalan lain. Dalam gambaran sederhana misalnya mestinya bahwa zakat di lingkungan masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim tadi Bapak sebutkan seharusnya dikelola lebih baik yang menjadi salah satu sumber dari pada negara ini sehingga peran yang real terukur untuk pembangunan.

Nah bagaimana caranya ya memang ada beberapa hal sebenarnya selain bahwa pengenaan wajib zakat, kalau di undang-undang awalnya itu hanya misalnya mengatur tentang amil zakat ini sudah seharusnya masuk kepada konten kewajiban zaka. Ini menarik ini. Kalau sudah masuk konten kewajiban zakat ini berarti ada konsekuensi tinggal negosiasi. Sebenarnya 2,5% yang harus dikeluarkan oleh lembaga perusahaan orang per orang. Ini merupakan sebuah satu pengeluaran tambahan di luar pajak kalau orang per orang adalah pajak tambahan nilai penghasilan atautkah kemudian ini? Saya kira itu memang isu dari awal.

Tapi maksud saya Baznas harus memiliki sebuah satu *blueprint* menuju ke sana dan mengajak kepada lembaga-lembaga ini. Itu yang pertama. Jadi kami menyarankan itu supaya *blueprint* itu nanti ada dibahas di dalam Baznas, lalu kemudian juga di-*share* kepada *stakeholder* dan juga kemudian dengan masyarakat dan juga lembaga-lembaga amil zakat dan juga dengan pemerintah. Sehingga mendapatkan ke depan itu paling tidak 2 atau 3 tahun ini semakin jelas. Tapi kalau cuma hanya mengikuti ini kalau saya perhatikan hampir semua penghasilan atau kemampuan penarikan zakat dari Baznas ini kan karena regulasi pemerintah bukan karena kemampuan lembaga Baznas sendiri. Coba kalau tidak ada SK Bupati tidak ada SK Gubernur, tidak bisa sama sekali.

Nah ini kenapa itu juga merupakan sesuatu yang harus dipikirkan agar bahwa ke depan ini lembaga amil zakatnya ini, saya tidak mengatakan semacam satu *pseudo* lembaga keuangan. Tetapi ini bisa saja menjadi salah satu daripada subordinat daripada negara ini terhadap pemasukan negara yang sangat luar biasa besar ini. Jadi saya pikir ini sumbang sih itu saja Pak terima kasih mohon maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak Kiai Bukhori selanjutnya Ibu Nur Azizah Tamhid.

**F- PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID, BA., M.A.):**

Terima kasih

*Bismillahirrahmannirrahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang saya hormati Bapak-bapak Pimpinan Komisi VIII dan juga seluruh Anggota.**

**Yang saya hormati Bapak Kepala Baznas, Bapak Profesor Bambang Sudibyo dan seluruh jajarannya.**



*Alhamdulillah* banyak dari teman-teman sudah menyampaikan ide gagasan dan evaluasinya. Ada beberapa hal yang sangat menjadi perhatian saya disebutkan di sini ZIS. ZIS adalah singkatan zakat, infak, sedekah. Nah ini saya tidak tahu karena saya baru masuk Pak. Jadi di Komisi VIII baru masuk dan memang baru banget. Jadi saya belum mengenal istilah-istilah di sini. Kalau sepengetahuan saya ZIS (zakat, infak, sedekah) itu di bedakan karena peruntukannya tentu beda. Zakat ada mustahiknya ada 8 asmah di Surat At Taubah Ayat 60. Kemudian tadi itu saya tidak tahu apakah kemudian Bapak menganggarkan untuk perumahan tadi itu, itu dari infak/sedekahnya atau zakatnya? Saya khawatir keliru ininya saja, keliru penyaluran. Jadi tadi ada penyaluran mana ya? Ada tadi itu ada rumah begitu. Itu yang pertama.

Kemudian dan termasuk, saya juga tidak tahu apakah termasuk sabilillah/ibnu sabil penyemprotan disinfektan, kemudian edukasi masyarakat ini terkait apa? Kemudian pembagian hand sanitizer yang menurut saya kalau ini sebetulnya bagiannya Kementerian Sosial begitu. Itu ke sana, maaf kalau saya salah persepsi. Itu terkait istilah ZIS (zakat, infak, sedekah) itu ke sana.

Kemudian yang kedua kalau tadi sudah banyak ditanyakan oleh teman-teman sebetulnya kemudian Baznas mendapat 240,39 miliar ini di tingkat pusat, itu objek muzakinya dari mana saja? Kalau tadi kan banyak masukan BUMN, perusahaan-perusahaan besar, kemudian tentu ASN setiap kementerian, dan sebagainya. Nah ini dapat 240,39 miliar itu objek atau muzakinya dari mana saja yang nanti tentunya sesuai dengan arahan teman-teman mudah-mudahan bisa diakomodasi.

Kemudian yang ketiga terkait di sini kok ada sumbangan kerja sama dengan BPKH? Yang menurut saya memang harus ya bukan suuzan juga enggak, cuma ada nominal kemudian sumbangan BPKH itu apa? Kemudian penyaluran seperti itu. Memang menurut saya laporan bukan laporan sih realisasi program ini kurang sistematis begitu. Jadi pemasukan dari mana saja itu peruntukannya itu apa saja begitu. Jadi gampang sekali dilihat begitu ini saja Pak terima kasih dan maaf.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih Bu Nur Azizah. Tadi kita menyepakati pukul 15:00 tadi ya? Kita perpanjang jadi 15:30.

**(RAPAT: SETUJU)**

**Bapak Ibu sekalian.**

Sekarang kita ke Anggota yang ada di virtual yang sudah ada di meja saya ada 4 orang yaitu Pak Iskan Qolba Lubis, Bapak Haji Muhammad Asli Chaidir, kemudian yang ketiga Bapak Haji Ahmad M.Si dan yang terakhir adalah Bapak Doktor Haji Muhammad Hidayat Nurwahid M.A. Saya

persilakan pertama kali kepada Bapak Haji Iskan Qolba Lubis M.A. Pak Iskan? Ya silakan Pak Iskan.

#### **F- PKS (H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.):**

##### **Kepala Baznas dan seluruh Anggota.**

Pertama saya mau apa ya mau kasih tanggapan secara global dulu ya. Pertama dari segi sisi Baznas itu kan akan menjadikan lembaga amil zakat terbesar ya di dunia, terbaik, dan terpercaya. Tapi begitu saya lihat realisasi anggarannya itu tidak *nyambung* antara visinya yang hebat dengan kerjanya. Jadi visinya melangit terus realisasinya tidak mumpuni begitu ya. Itu pertama analisa secara global.

Yang kedua, seharusnya Baznas ini dia harus taat asas ya. Taat asas itu dalam pelaksanaan amil zakat itu sederhana, sudah ada formatnya, sudah ada fatwanya. Tetapi saya lihat Badan Amil Zakat ini mulai .... dan dari sebelumnya sudah kelihatan. Contoh ya ini minta dijawab Pak Pimpinan, Badan Amil Zakat nasional memberikan mengeluarkan dana dari fisabilillah itu untuk merenovasi garis miring atau membangun gedung ya. Dalam konsep zakat itu adalah .... ini konsep umum yang berlaku di seluruh dunia ya bahwa zakat itu di ambil dari orang mampu diberikan kepada orang tidak mampu.

Kalau dia dibuat menjadi gedung itu negara yang harus mengerjakan bukan harta itu untuk zakat itu tidak boleh. Itu melanggar asas ya seharusnya Bapak-bapak itu sudah mengerti yang begini-gini karena ini sudah standar internasional. Tidak boleh uang zakat itu ini isunya akan besar nanti. Uang zakat di pakai untuk membangun gedung itu kan dana Fisabilillah itu dalam bukunya/fatwanya ... Murdhawi, fisabilillah itu dua. Yang pertama yang memperjuangkan jihad di jalan Allah tapi sebagian ulama membolehkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti membangun masjid, membangun dakwah tapi bangun gedung untuk Baznas itu tidak boleh. Itu fatal itu, Pak Ketua saya minta ini supaya dibahas ini bantulah bagaimana hukumnya ini dan kalau bisa ini supaya BPK ini bisa supaya diaudit ini Baznas tapi kalau satu contoh ya.

Terus yang kedua ketidaktaatan asas itu adalah mengeluarkan ini ada laporan dari masyarakat saya tidak tahu benar atau tidak minta tolong di jawab dan terbuka bahwa 1/8 melebihi dana amil dipakai lebih dari 1/8 itu juga tidak boleh ya. Kemudian ada lagi masalah moral masyarakat mengatakan mobil-mobil mewah berbaris di Baznas gajinya mereka antara 50/60 tapi sebagian dari anggota komisinya saja itu kerja di tempat lain. Bahkan ada yang mengusulkan untuk proyek sapi 1 miliar beberapa tahun yang lalu kan pertanggung jawaban. Ini hal-hal seperti ini, kalau Baznas seperti ini kerjanya tidak akan di percaya oleh masyarakat.

Kemudian yang harus di tanyakan apakah betul dana yang di .... BPKH itu melalui penunjukan langsung bukankah seharusnya dalam Baznas itu harus ada sistem dalam jumlah-jumlah tertentu? Tidak boleh satu orang yang memutuskan harus berbentuk tim begitu. Nah SOP itu tolong dijelaskan kita karena ini banyak masukan dari masyarakat. Kok bisa apa dana hanya satu

orang yang mengusulkan? Atau ini tiba-tiba padahal kan Baznas itu, itu kan ditujukan kepada kluster paling bawah orang miskin kalau. Di Kemenkes itu ada datanya itu kluster ini yang paling utama. Nah dia kalau itu jumlahnya .... kecil-kecil jadi kalau umpamanya bantuan sekolah, bantu rumah yang tidak mampu. Tapi kalau dalam jumlah besar umpamanya dibelikan untuk sapi dalam jumlah milyaran itu nanti semakin tidak memenuhi target ininya.

Jadi itu sistem itu harus terbangun di Baznas. Apalagi Baznas kan menyupervisi sekian lembaga amil zakat di Indonesia ada OPD jangan sampai memalukan dia harus lebih *prudent*, lebih profesional, lebih amanah, lebih terbuka, begitu. Sebab kalau tidak nanti UPJ di daerah lebih kacau lagi seperti yang dikatakan Ibu tadi zakat itu kalau ... dibantu 3 juta tapi kalau umpamanya ini timnya Bupati bisa keluar 50 juta. Ini tidak boleh seperti ini Baznas itu membuat sistem keseluruhan Indonesia memberikan regulasi yang jelas begitu. Itu ya yang harus diinikan.

Kemudian di Baznas sekarang tidak ada sistem *check and balance* siapa yang melakukan pengawasan? Karena peluang penyimpangan itu dimanapun kapanpun terjadi ya. Dan itu catatan-catatan ... bahkan juga UPZ dan lembaga-lembaga zakat yang lain meraka tidak mendapatkan supervisi dan memang betul dari optimalisasi realisasi anggaran itu tidak terlihat bahwa Baznas itu akan menjadi lembaga yang terbaik dan terpercaya dalam tanda kutip ya, tidak kelihatan antara visi dan realisasi tidak menyambung. Jadi akhirnya kita banyak dibuat seperti PHP.

Sebagai contoh saja ini membuktikan betapa Baznas ini jarang berkonsultasi ke DPR. Memang zakat ini bukan APBN iya tetapi dana yang di kumpulkan berdasarkan undang-undang. DPR berhak. Padahal umpamanya jangan sampai zakat bergerak padahal teman-teman banyak ada yang dari Papua dari Medan, tidak ada yang masuk komunikasi kalau teman-teman mengusulkan mungkin tempatnya sangat miskin di Medan, di Papua, dimana itu sama sekali tidak ada perhatian dari Baznas. Jadi ini akhirnya kita tiba-tiba mendapat laporan kita kaget begitu ya. Kok sebegitunya Baznas yang selama ini saya sendiri sangat kagum sangat memperhatikan tapi ternyata begitu kita mengatakan tidak adanya taat asas di Baznas ini kita jadi seperti bom di siang hari begitu ya yang kita buat ... .

Jadi ini ke depan Pak Ketua kita perlu membahas khusus nanti tentang bagaimana Baznas. Ini jangan juga terlalu banyak kumisionernya 8 orang itu tidak efektif sekarang yang efektif itu cuma 3, 5 begitu. Apalagi biayanya anggarannya tidak banyak begitu dan ini sudah terjadi saya lihat mengarah kepada tidak taat asas dalam pelaksanaan. Padahal itu sudah ada formatnya di seluruh dunia sudah ada fatwanya, ada sistemnya bahkan saya sendiri punya buku tentang *Riqomatul Ammah* bagaimana sistem perbankan kemudian amil zakat dan semua. Semua ada itu. Dan itu pasti sudah ada di Baznas tapi ada kemauan atau tidak? Dan itu yang harus kita buktikan bukan masalah jadi 8 miliar itu tidak seberapa anggaran negara tetapi fungsi Baznas adalah membantu orang-orang miskin di Indonesia. Itu harus fokus ke situ bahwa zakat itu diambil dari orang kaya dikasih kepada orang miskin.

Jadi tidak boleh zakat itu disalahgunakan dengan ada komisioner menunjuk ini tiba-tiba diberi sapi 1 miliar ke tempat. Tiba-tiba juga saya ingin

mempertanggung jawabkan minta di jawab nanti dana yang ... oleh BPKH ini juga masalah. Kita menjadi penting kita harus mengawasi BPKH, kita harus mengawasi Baznas ke masyarakat. Jadi 2 kali kerja kita ini. Jadi ada tumpang tindih antara BPKH dengan Baznas. Jadi tolong nanti diberi tahu apa betul dalam melaksanakan dana yang diberikan ... ada penunjukan langsung atau tidak? Dan kalau ada penunjukan langsung bagaimana sistem di dalam kontrolnya dan berapa nilainya? Ini sudah saya teknis ya tapi saya perlu saya terima saya dapat karena begitu banyak keluhan masyarakat kepada saya ya. Apalagi dari dapil dan juga lembaga-lembaga masyarakat mereka merasakan tidak diperhatikan sama sekali. Pantas kalau memang yang diperlihatkan .... memang tugas ya tugas karena tugas mendadak tapi bukan itu yang di maksud tugas utama tugas utama tupoksi di Baznas adalah bagaimana menyejahterakan masyarakat, bagaimana mengoptimalkan zakat. Itu sekedar lewat saja karena ada covid kita disinfektan. Tapi tugas utamanya bukan itu, itu tugas itu Tupoksinya Komisi IX itu.

Itu Pak Ketua, mudah-mudahan tolong dijawab yang apa saya minta Baznas itu jujur di depan Komisi VIII. Kita tidak ada kepentingan Pak ya. Dari dulu juga itu tidak ada yang pergi merengek-rengok pergi ke Baznas dari dulu kita biarkan saja. Tetapi kalau sudah tidak ada taat asas, ini menurut saya fatal ya. Kemarin kan saya minta supaya ditunda karena hal-hal seperti ini sangat penting tidak ada maksud kita apa-apa tapi kita ingin Baznas ini menjadi lembaga terbaik dan terpercaya seperti yang diinginkan. Tetapi jangan seperti jauh panggang dari api. Terima kasih Pak Ketua.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak Kiai Iskan. Selanjutnya Pak Haji Muhammad Asli Chaidir.

**F- PAN (H. MHD. ASLI CHAIDIR, S.H.):**

**Yang saya hormati Pimpinan yang hadir dan Anggota Komisi VIII serta yang hadir di ruangan Komisi maupun di virtual.**

**Yang saya hormati Kepala Badan Amil Zakat Nasional Bapak Bambang Sudibyo beserta seluruh jajarannya.**

Pertama-tama terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini kita dapat melakukan rapat dengan kepala Baznas yang sempat tertunda kemarin. Kemudian hari ini membawa manfaat bagi pengembangan zakat dan pengembangan kesejahteraan umat.

Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan terkait tema rapat hari ini. Pertama saya pribadi dulu memberikan apresiasi kepada Baznas karena

meskipun anggaran Baznas yang kecil itu hanya 8 miliar kemudian dipotong 724 juta untuk penanggulangan Covid-19. Sehingga hanya 7,2 miliar saja tapi sudah dapat menghasilkan mengumpulkan zakat 240 miliar dan realisasi penyaluran sebesar 139 miliar dengan jumlah mustahik 625.000 orang.

Yang kedua Baznas perlu meningkatkan kinerja pengumpulan zakat pada tahun 2020, sehingga target pengumpulan zakat sebanyak 12 triliun dapat tercapai karena potensi zakat Indonesia itu sangat luas. Dukungan anggaran yang kecil dari APBN jangan menjadi penghalang untuk terus berkiprah dalam memajukan kesejahteraan umat Islam. Sumber daya manusia Baznas perlu di tingkatkan dengan melakukan berbagai pelatihan keterampilan agar Baznas dapat lebih maksimal dalam melakukan fungsinya.

Ketiga kendala dari kekurangan pada Baznas pasti ada dikarenakan berbagai keterbatasan itu kita harus kita maklumi. Tetapi Baznas adalah lembaga yang Komisi VIII DPR RI harus juga memperhatikan dari aspek dukungan anggaran dan kesejahteraannya. Sudah ada kerja sama antara Baznas dengan BPKH untuk menyalurkan bantuan sebesar 16 miliar lebih. Ini adalah kerja sama yang bagus dan perlu ditingkatkan kualitas pelayanan terhadap semua masyarakat jangan ada perbedaan perlakuan semua harus di layani dengan baik.

Terus ada dari bahan yang disampaikan kita lihat ada 2 kegiatan penting dalam anggaran Baznas yaitu sosialisasi pergerakan zakat melalui media cetak nasional dan media *online* nasional dengan anggaran 239 juta belum terealisasi, FGD STBE yang juga belum terealisasi. Saya kira program ini sangat penting untuk Baznas dengan sosialisasinya akan membantu Baznas dalam merealisasi target perolehan zakat nasional dan FGD itu akan memperbaiki kinerja Baznas ke depannya.

Apa sebenarnya yang terjadi kendala program sosialisasi Baznas di media dan FGD Baznas karena saya berharap dalam masa materi sosialisasi Baznas nantinya disertai penguatan profil Baznas serta ajakan ke masyarakat untuk dapat menyalurkan zakat, infak, dan sodaqoh melalui Baznas karena saya lihat masyarakat tidak banyak paham tentang Baznas dan walaupun paham ingatan masyarakat lebih kepada pengelola zakat saja. Pimpinan demikian saja Pak Bambang semangat mudah-mudahan lebih baik ke depan terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Terima kasih Pak Asli Chaidir. Selanjutnya Bapak Drs Haji Achmad M.Si dari fraksi Partai Demokrat silakan Pak Achmad.

**F- PARTAI DEMOKRAT ( Drs. H. ACHMAD, M.Si. ) :**

Terima kasih Pimpinan.

*Bismillahirrahmannirahim*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang saya hormati Pimpinan beserta Anggota baik secara fisik hadir di rapat Komisi VIII maupun yang virtual.**

**Seterusnya Bapak Kepala Baznas Bapak Bambang dan juga jajarannya.**

Pertama saya terus terang saya agak kecewa. Saya membuat surat untuk pertemuan. Maksudnya apa yang saya sampaikan ini kira-kira kita diskusikan begitulah *interest* ... tetapi tidak pernah bahkan hanya diberikan waktu 5 menit untuk berjumpa itu sibuk sekali. Nah saya kira kan mitra kerja ini terus terang ini kurang baik ya. Seorang anggota dewan mau bertemu mau berjumpa secara resmi surat tertulis tidak bisa ketemu sampai hari ini. Nah ini saya kira mudah-mudahan ke depan ini kerja sama kita akan baik lagi.

**Pak Bambang yang saya hormati.**

Pertama supaya Baznas ini supaya zakat ini merupakan salah satu pilar utama untuk pembangunan bangsa Indonesia ini. Saya kira sudah saatnya Baznas itu memimpin *grand desain* seperti apa potensi dari Aceh sampai ke Papua sana terhadap zakat itu dengan *mapping* itu kita mudah membuat target begitu lho. Saya kira Bapak membuat target 12 Triliun itu tidak ada dasarnya.

Nah Bapak Ma'ruf Amin Wapres itu pernah membuat *statement* potensi zakat Indonesia ini 350 triliun. Nah ini suatu gambaran ya. Nah saya mengharapkan untuk anggaran tahun 2021 ini Baznas membuat grand desain daripada potensi zakat yang ada di Indonesia ini. Mulai dari masyarakat biasa perusahaan apa namanya karyawan dan seterusnya tertuang di dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011. Sehingga dengan adanya grand desain itu Bapak bisa bekerja dengan maksimal. Nah ini yang salah satu.

Kedua target Pak ini target 12 triliun iya kan? Kemudian dibandingkan dengan realisasi target tadi seperti angka main-main. Nah coba ke depan ini Bapak target jangan 12 triliun coba buat 50 triliun kenapa? Bapak ini sama dengan keuangan ini mencari dana ini untuk umat. Jadi kalau target 50 triliun Bapak dengan jajarannya ke daerah itu maksimal pekerjaannya karena ada target yang tinggi, dengan target tinggi kita maksimal untuk mencapainya tapi kalau target hanya 12 triliun besok 15 triliun itu kerjanya biasa-biasa saja. Sedangkan kita harapkan lembaga ini luar biasa untuk membebaskan masyarakat Indonesia ini khususnya masyarakat Islam ini untuk bebas dari kemiskinan, karena kemiskinan itu akan mendekati orang kekufuran. Nah ini misi yang sangat penting.

Nah oleh sebab itu target. Coba buat target 50 triliun 2021 ini berapa anggaran yang Bapak perlukan untuk mencapai target itu kami Komisi VIII siap. Tapi jelas mau tidak mau, suka tidak suka Bapak bekerja. Ini program unggulan Pak cobalah tidak usah banyak-banyak program dari Baznas ini. Coba salah satu daripada kewajiban itu orang bebaskan orang dari miskin itu coba buat program ekonomi yang nyatanya jelas membebaskan umat ini dari kemiskinan dengan program ekonomi kerakyatan itu. Dengan dana yang di

bayarkan dengan dana yang ... kita harapkan kemiskinan ini Baznas berkontribusi yang nyata terhadap penurunan angka kemiskinan di Indonesia. Karena yang terbesar itu masyarakat miskin itu ya masyarakat Islam karena terbesar masyarakat Indonesia ini Islam begitu sehingga kita harapkan dengan keyakinan itu, maka mudah-mudahan apa namanya masyarakat Indonesia ini bisa ... .

Kemudian yang banyak disorot teman tadi Pak ini masalah promosi ini. Anggaran sudah 1 semester iya kan 239 juta itu 0 realisasinya. Nah bagaimana masyarakat Indonesia akan *trust*, akan percaya dengan Baznas ini kalau kinerjanya kalau produknya tidak dipromosikan, tidak disampaikan melalui media, apa media medsos, apa media elektronik. Bagaimana orang mau percaya? Kerjanya tidak jelas. Nah oleh sebab itu promosi sangat penting untuk memberikan *trust* pada rakyat bahwa Baznas itu satu-satunya yang bisa terpercaya karena programnya jelas. Ingat jadi diskusinya begini. Jadi Bapak .... juga jelas.

Pak, sebagai contoh saya 2010 menetapkan seluruh PNS saya harus membayar zakat fitrah ... anggaran kami hanya 1,2 triliun karena saya melihat per tahun saya mendapatkan dana dari ASN itu saja. Dengan dana ASN ... itu saya berikan untuk kesejahteraan umat sehingga masyarakat melihat itu *trust*-nya timbul membayar Baznas daerah. Jadi ini perlu promosi ini disampaikan dan ada lagi yang tersentuh hati saya Pak. Kenapa? Ada berapa pegawai saya yang datang Pak sejak kami membayar zakat-zakat ini, ini kok rumah tangga kami tenang Pak? Anak-anak kami yang tadi malas belajar kok rajin Pak. Salah satu efeknya membayar zakat ini jadi efek ini kalau kita sebarkan kita luaskan masyarakat ini. Masalah pendekatan religi ini luar biasa Pak dari hati ke hati ini.

Jadi oleh sebab itu, kami mengharapkan program kerja yang sudah Bapak laksanakan itu dipromosikan. Ini tidak usah karena rakyat kami Anggota dewan sendiri Dapil kami sendiri tidak tahu kami apa program Baznas ini di daerah kami. Sulit mendapatkan informasinya. Kemarin begitu juga antara BPKH bekerja sama dengan Baznas untuk mendapatkan lembaga di yayasan yang menyalurkan sampai hari ini tidak dikasih tahu sama sekali apa yayasannya. Nggak boleh ada kunci-kuncinya seperti itu. Nah kedepan ini kalau kita mau Baznas ini salah satu pilar ekonomi ke depan ini ayo kita kerja sama terbuka kita. Tidak ada yang kita tutup-tutupi Pak. Ini harapan kami. Itu poin pertama Bapak.

Yang kedua Pak, ini sesuai dengan Kepres Nomor 16 Tahun 2018 itu PL-nya hanya 200 juta tetapi ini adalah pengadaan 6,3 miliar APD ekstra sampai 18 miliar. Ini bagaimana sih sistem Bapak ini apakah PL, apakah sistem pelelangan apa bagaimana? Karena bagaimanapun ini uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Ini tidak pernah dikoordinasikan apalagi Bapak kerjasamanya BPKH 16,5 miliar ini tidak pernah di koordinasikan dengan kita. Terutama saya sarankan kepada rakyat. Nah oleh sebab itu kami minta penjelasan dari Bapak pengadaan ini sistemnya apa? Apakah PL, PL hanya 200 juta. Ini rata-rata ... semuanya. Apakah sudah Bapak punya tim ... disana atau bagaimana? Ini dijawab Pak. Ini saya minta jawab yang jelas ini sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang melanggar hukum ketentuan. Maksud

kita baik tapi sistemnya tidak baik ... nanti di update nah ini kami harapkan tentang sistem pengadaan-pengadaan yang ada.

Terakhir ya amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kami sangat mendukung sekali amandemen ini ya. Kita siap Komisi VIII ini, ya terutama masalah yang potensi yang ada bagi perusahaan. Ini Pak di Riau ini perkebunan dari 2,8 juta hektar 30% perkebunan di Indonesia ini ada di Riau Pak itu pekerjanya 80% itu muslim semua. Tidak jelas sampai sekarang bagaimana. Ini potensi.

Nah oleh sebab itu kami mengharapkan ini kita dukung amandemen ini terutama yang berkaitan dengan potensi-potensi ini sehingga diharapkan memang zakat ini menjadi salah satu ekonomi tetap. Terutama insentif ini Pak Ketua kami setuju Pak. Kalau perlu masyarakat kita kita yang sudah membayar zakat itu bebas dari pajak. Karena apa kalau retail ini membayar zakat itu semakin ada keberkahannya. Semakin ada kesejukan perkembangannya. Jadi kita minta juga ke pemerintah yang masyarakat yang sektor informal ini kita kalau dia sudah bayar apa namanya zakat jangan bayar pajak lagi. Nah ini salah satu kompensasinya. Nah sehingga kita harapkan betul-betul pajak ini menjadi tulang punggung ekonomi kita sehingga kita harapkan masyarakat dari yang kecilpun mampu membayar zakat semuanya. Karena apa? Memang ini salah satu lembaga yang kita percaya dari pemerintah untuk mengelola zakat ini.

Jadi kami kira ini Pak Ketua, memang kami agak emosi memang iya saya sangat tersinggung 2 kali mau ketemu dengan Bapak tidak bisa. Dan hanya itu hanya kasih 5 menit jadi enggak bias. Jadi oleh sebab itu kami harapkan ke depan kami datang itu Pak untuk memberikan masukan-masukan karena kami 40 tahun di birokrasi pemerintahan ini. Jadi bisa tukar pikiran maksudnya begitu tidak apa-apa. Tapi sayang Bapak tidak terima sayang Bapak sibuk terus lebih sibuk daripada Presiden, mungkin kalau Presiden Komisi VIII malah lebih siap tapi Bapak tidak siap. Jadi kami rasa itu saja Pak Ketua terima kasih mohon maaf.

*Wa billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak Haji Achmad, selanjutnya Bapak Doktor Muhammad Nur Hidayat Wahid, kami persilakan Pak.

**F- PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A. ) :**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Rekan-rekan Pimpinan Anggota Komisi VIII yang saya hormati.**



**Pak Bambang Sudibyo dan seluruh rekan-rekan semuanya Baznas dan seluruh yang saya hormati.**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya melanjutkan yang disampaikan oleh rekan-rekan semuanya. Yang terakhir tadi Pak Achmad menyampaikan 2 yang perlu saya dipentingkan dan patut saya garisbawahi memang benar karena manfaat daripada zakat itu seharusnya bisa tersosialisasikan kembali. Pertama kalinya adalah kepada para muzaki sebelum kepada para mustahik. Paradigma ini saya kira penting untuk terus digencarkan disosialisasikan manfaatnya tadi Pak Achmad sudah menyampaikan. Misalnya tapi teks Qur'an juga amat sangat jelas untuk "*min amwalihim shadaqatan tuthahiruhum watuzakkihim*" *hum* disitu atau *hum* dan *him* di situ bukan untuk para mustahik tetapi *amwala al muzakki bihaa*" dengan zakat itu. Jadi paradigma ini memang adalah prinsip dasar dan Al-Quran sosialisasinya mudah-mudahan karenanya memudahkan rekan-rekan dari Baznas untuk merealisasikan target-target zakat meningkatkan dari meningkatkan kemampuan untuk mengumpulkan zakat dan seterusnya.

Yang nomor 2 kalau kaitannya dengan amandemen terhadap Undang-undang zakat saya sepekat sekali. Dari dulu selalu kita sampaikan agar seharusnya memang Undang-Undang tentang Zakat ini mampu untuk menghadirkan ketentuan baru yang berpihak kepada para muzaki dan dengan itu akan meningkatkan kemampuan dan kemauan mereka untuk zakat yaitu ketentuan bahwa zakat adalah setara dengan pajak. Maksudnya yang sudah bayar zakat maka dengan sendirinya volume untuk pembayaran pajaknya akan dikurangi dengan seberapa besar dia membayarkan zakat. Bila itu bisa dilakukan maka selain adanya kesetaraan hukum dan harusnya zakat lebih tinggi karena zakat adalah bukan hanya kewajiban kepada manusia tapi kewajiban kepada Allah. Tapi mudah-mudahan dengan cara bahwa membayarkan zakat artinya sudah membayarkan pajak dan artinya ada pengurangan untuk siapa yang dipajaki maka akan mendorong para muzaki untuk berzakat lebih banyak lagi.

**Prof Bambang yang saya hormati.**

Saya mengapresiasi apa yang di laporkan di sini bahwa untuk realisasi dari pada program pengumpulan zakat, infaq dan sodaqoh untuk periode ini sudah lebih bagus dan bahkan melampaui dengan periode yang sebelumnya. Di sini di sampaikan tentang angka yang cukup bagus begitu ya. Tetapi kemudian ketika menyebutkan tentang realisasi APBN ada kendala yaitu penyerapan yang berkurang di antara alasannya adalah karena tidak adanya biaya operasional termasuk tidak adanya biaya perjalanan. Padahal di depan ketika Baznas menyampaikan tentang sebab mengapa kemudian pengumpulan ZIS di era Covid ini justru mengalami kenaikan karena sudah mengantisipasi pengumpulan zakat melalui media digital. Kalau melalui media digital bisa dilakukan dan berdampak kepada peningkatan kemampuan pengumpulan ZIS maka harusnya tidak ada halangan untuk kemudian di era semacam ini penyerapan anggaran pun tidak bisa di maksimalkan sebab lagi-

lagi tadi ada masalah Covid-19 tapi ternyata penyerapan bisa meninggi. Harusnya kemudian sekarang bilapun tidak ada dana perjalanan harusnya tidak terkendala karena semuanya bisa dikelola melalui jaringan kita.

### **Yang kedua Profesor yang saya hormati.**

Kita faham bahwa Baznas ini adalah makhluk begitu ya atau sebagai ... yang di hadirkan melalui reformasi. Karenanya undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang tentang zakat ini adalah Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 maksud saya Undang-Undang tentang Baznas dan undang-undang ini dan kemudian perbaikannya undang-undang berikutnya tidak mengurangi 2 fisik dasar mengapa Baznas dihadirkan yaitu kaitannya dengan efektifitas dan efisisensi terkait dengan pengelolaan zakat. Dan nomor 2 adalah untuk meningkatkan manfaat zakat bagi kesejahteraan dari khususnya para mustahik yang ada di Indonesia.

Pertanyaan saya begini lho Pak. Ya mudah-mudahan akan menjadi program yang bisa dievaluasi sepanjang tahun dari periode ke periode dan terutama periode Prof. Bambang ini sejauh mana kemudian zakat, infaq, dan sodaqoh ini bisa mengurangi kemiskinan di Indonesia dan mengurangi karenanya jumlah para mustahik dan meningkatkan jumlah para muzaki dan berapa pihak yang dulu adalah mustahik dan kemudian ketika mendapatkan manfaat daripada dari Baznas begitu ya dan atau lembaga yang kemudian dari Baznas kemudian bisa diubah menjadi kondisinya tidak lagi menjadi mustahiq mungkin menjadi muzaki? Berapa presentasinya Pak? Supaya dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa Undang-Undang tentang zakat dan melaksanakan salah satu dari pada realitas kewujudannya untuk meningkatkan manfaat dari pada zakat untuk menuntaskan kemiskinan.

### **Berikutnya Bapak yang saya hormati.**

Laporan di sini tentang kinerja realisasi penanganan zakat dilaporkan bahwa di antara program zakat itu juga adalah untuk kaitannya yang masalah edukasi masyarakat sekolah, masjid, dan lain-lain. =Kita tahu bahwa Baznas dan zakat itu adalah spesifik. Ada spesifikasinya bahwa kemudian dia bisa untuk umum ya. Tetapi yang paling utama tentu adalah untuk kepentingan keumatan yang paling utama. Tapi kenapa ya di sini disebutkan hanya sekolah dan tidak disebutkan misalnya Madrasah, tidak disebutkan misalnya masjid, pesantren? Misalnya padahal jelas sekali pada konten Baznas yang di sebutkan pertama sekali walaupun sekolah ya sekolah agama Islam dalam konteks ini maksud saya ya apakah itu Madrasah atau Ibtidaiyah, Aliyah. Dan kita tahu persis bahwa sekolah-sekolah ini begitu amat sangat merana sangat memerlukan kepedulian daripada lembaga-lembaga yang memang mempunyai pelajaran untuk yang termasuk di antaranya adalah Baznas.

Jadi menurut saya harus perlu ada penjelasan dan sekaligus perlu ada penambahan atau pihak yang kemudian mendapatkan manfaat daripada realisasi penanganan pandemi dalam konteks ini . Yaitu bukan hanya sekolah tapi juga ada madrasah juga ada masjid. Karena kita tahu juga madrasah dan juga Pesantren kita tahu belakangan juga pesantren juga terkena daripada Covid-19 ini. Mengapa ini tidak disebutkan disana? Apakah tidak ada programnya aneh kalau tidak ada programnya? ... mestinya itu diadakan.

Berikutnya juga ada program untuk cuci karpet masjid. Saya ingin sampaikan bahwa biasanya justru pada era Covid-19 ini karpet-karpet di gulung semuanya Pak. Yang dikeluhkan oleh masjid adalah justru pembayaran listrik. Karena dengan adanya Covid-19 dan kemudian masjid itu ditutup dan kemudian pengajian-pengajian banyak tidak diselenggarakan di masjid; infaq dan sodaqoh di masjid menjadi sangat-sangat berkurang. Sehingga kemampuan masjid untuk membayar listrik menjadi amat sangat berkurang. Mereka mengeluhkan kondisi ini dan menyampaikan kepada kami bahwa di Komisi VIII untuk di advokasi. Jadi menurut saya ini agak ada *misleading* ketika kemudian justru ada cuci karpet masjid padahal karpetnya sudah di gulung sementara masjid yang mereka perlukan adalah bukan cuci karpetnya justru adalah untuk meringankan atau membantu untuk pembayaran listrik dari masjid dan mushola-mushola terdampak Covid-19 itu.

Lalu kemudian yang saya sampaikan juga terkait dengan ini adalah mengapa tidak ada dugaan di sini dalam kinerja realisasi penanganan pandemi oleh Baznas dan LAZ Indonesia dikaitkan dengan bantuan untuk para santri, para mahasiswa perguruan tinggi Islam termasuk juga mahasiswa Indonesia yang sekolah di perguruan tinggi Islam yang ada di luar negeri entah itu di Mesir atau di Pakistan di Malaysia dan lain sebagainya. Padahal jelas sekali adalah mereka bagian dari mustahik dan mereka banyak yang kemudian terdampak dengan Covid-19 dan mestinya kemudian Baznas juga memberikan program spesial untuk mereka-mereka ini selain daripada program umum yang mestinya berlaku sepanjang waktu yaitu keberpihakan Baznas untuk kemudian juga membiayai dan atau terlibat di dalam kader-kader ulama umat yang unggul-unggul melalui program beasiswa yang di berikan oleh zakat.

Terakhir Bapak yang saya hormati ada program dari Baznas yang saya baca di media yaitu program Bank Makanan. Ini adalah program terobosan yang menurut saya sangat baik apalagi dalam konteks Covid-19 ini tentu banyak kemudian restoran dan atau hotel dan atau perusahaan-perusahaan penyedia pesta termasuk juga pesta pernikahan yang kemudian dalam tanda kutip makanan yang mereka sediakan tidak sepenuhnya bisa habis. Dan karenanya potensinya menjadi sampah menjadi mubazir. Dan Indonesia di kenal sebagai negara yang terbesar ketiga dalam hal pemubaziran makanan. Dan untuk itulah karenanya dengan adanya bank makanan adalah satu hal yang sangat diperlukan. Saya tahu sudah dibuat focus group discussion disini dan di Indonesia memang ada beberapa Lembaga yang sudah menyelenggarakan kegiatan bank makanan ini dan mereka bagikan mereka kerja sama dengan banyak pihak untuk bisa mereka bagikan. Tapi yang mereka keluhkan adalah belum adanya payung hukum untuk menyelenggarakan kegiatan ini. Banyak masalah di lapangan yang jadi masalah ketika tidak ada payung hukumnya.

**Prof yang saya hormati.**

Kami sedang mengusulkan satu Rancangan Undang-undang tentang Bank Makanan untuk kesejahteraan Indonesia. Nah ini undang-undangnya kami siapkan dan kemudian para pakar sedang berjalan. Saya kira sangat bagus bila kemudian nanti Baznas-pun juga bisa bersinergi dengan kami

untuk kemudian bisa menyukseskan program bank makanan ini salah satu di antaranya adalah melalui jalur adanya payung hukum. Dan itu harus di buat melalui salah satu undang-undang melalui mekanisme pembuatan undang-undang yang ada di DPR. Kami sedang menyiapkan itu dan sekali lagi sangat bagus untuk kemudian bisa kita sukseskan secara bersama-sama sehingga dengan demikian maka Baznas-pun juga bukan hanya bisa mengurangi sampah tapi juga bisa melaksanakan peran dan *fuqara* dan *masakin* supaya nanti mereka bisa berubah dari mustahiq menjadi muzzaki. Saya kira demikian terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

Terima kasih Pak Hidayat Nur Wahid dari meja Anggota ada lagi? Cukup ya? Saya ingin memberikan catatan penting dari apa yang di sampaikan oleh para Anggota, Pak Kepala Baznas. Pertama bahwa saya kira semua punya ekspektasi yang sangat besar Pak. ahwa Baznas dengan posisinya sangat penting dalam rangka bagaimana dapat mengumpulkan potensi-potensi zakat yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebagai umat muslim terbesar di dunia dan maka dengan demikian maka seharusnya kita semua mampu untuk bisa mengoptimalkan zakat, infaq, dan sodaqoh untuk kepentingan umat begitu.

Dan saya kira apa yang di sampaikan oleh Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VIII ini sejalan ya saya kira beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah laporan yang dikeluarkan oleh World Charity Aid Fondation yang menempatkan Indonesia itu adalah negara yang paling dermawan di seluruh dunia. Itu mengalahkan Amerika Serikat. Saya buka datanya itu Pak. Indonesia itu mengalahkan Australia, New Zealand, Amerika, Irlandia bahkan dengan apalagi dengan negara-negara di Timur Tengah. Jadi betapa sebetulnya potensi ekonomi Indonesia untuk membangun filantropi itu justru lahir dari masyarakat itu sendiri sebagai modal sosial yang luar biasa.

Nah pertanyaannya kan tinggal bagaimana mampu untuk mengelola itu dengan sebaik-baiknya dan ekspektasi dari Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi VIII itu sangat tinggi. Karena apa? Karena memang modal sosial dari masyarakat kita itu sangat tinggi dan itu perlu di optimalkan sedemikian rupa oleh Baznas agar dapat memayungi dan mengelola dan mendayagunakan potensi-potensi yang di miliki oleh masyarakat muslim Indonesia.

Yang kedua saya juga, sebagaimana ada pertanyaan Pak sebagaimana tercantum kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 bahwa lembaga-lembaga amil zakat itukan punya kewajiban untuk melaporkan kepada Baznas tentang proses pengumpulan termasuk juga soal

pendistribusiannya. Itu saya kira Pasal 19 itu jelas sekali tugas yang di lakukan oleh Baznas. Kami ingin sekali sebetulnya supaya kami juga tahu sejauh mana potensi-potensi lembaga amil zakat tersebut diketahui oleh kami di Komisi VIII. Misalnya berapa jumlah LAZ yang ada dan berapa yang telah mereka yang dana masyarakat baik zakat infaq maupun sodaqoh yang di percayakan kepada LAZ tersebut yang disebut oleh Pak yang dilaporkan tadi sebesar 12,48 triliun itu, itu ke LAZ mana saja kami juga penting untuk tahu Pak dan itu harus transparan disampaikan kepada kami di Komisi VIII. Karena itu adalah juga perintah dari undang-undang Pak. Kami hanya menjalankan apa yang menjadi perintah dari undang-undang. Tidak dalam laporan ini kami tidak melihat secara detail LAZ-LAZ mana saja yang 14,8 triliun itu, 12,4 triliun itu didapatkan Pak.

Selanjutnya di Pasal 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebetulnya ruang bagi Baznas untuk bisa mengumpulkan zakat itu sangat terbuka lebar. Karena pada Pasal 22 ya disebutkan bahwa zakat yang di bayarkan oleh Muzzaki kepada Baznas atau LAZ ya itu dikurangkan penghasilan kena pajak. Ini operasionalnya itu bagaimana Pak ini kan sebetulnya potensi yang cukup besar dimana pasal 22 ini memberikan ruang bagi siapapun warga negara Indonesia yang muslim untuk kalau sudah bayar zakat maka penghasilannya tidak perlu bayar pajak kan begitu? Kira-kira begitu pemahaman saya tapi tolong koreksi. Tapi yang di maksud dengan pasal 22 itu operasionalnya itu seperti apa zakat yang di bayarkan oleh muzzaki kepada Baznas atau LAZ ya. Saya harus dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Nah itu pemahamannya seperti apa?

Yang selanjutnya, Pak kepala sekali lagi tentu kami juga ingin melakukan pengawasan tentang praktek-praktek saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita jalan-jalan ke daerah-daerah itu banyak sekali Pak rumah-rumah zakat di berbagai tempat. Nah pertanyaan saya adalah sejauh mana pengawasan yang dilakukan oleh Baznas terhadap berbagai macam rumah-rumah zakat itu? Dan apakah keharusannya kan memang mereka harus terdaftar yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui rekomendasi yang di dikeluarkan oleh Baznas kan? Itu kan menurut undang-undang.

Nah pertanyaanya apakah ada pengawasan terhadap lembaga-lembaga yang saya kira banyak sekali Pak di media sosial atas nama lembaga ini lembaga zakat ini dan lain-lain ya mereka ya menarik atau menarik zakat dari masyarakat itu. Nah sejauh ini sejauh mana peran yang di mainkan oleh karena di dalam undang-undang itu jelas bahwa tindakan seseorang yang tidak terdaftar sebagai lembaga amil zakat itu melanggar undang-undang. Itu jelas sekali di pasal 38 dan kalau tidak salah dan kalau ada kalau dia melakukan itu menurut undang-undang bisa terkena hukuman Pak. Hukumannya itu satu tahun penjara dan terkena denda paling besar 50Juta kalau tidak salah nanti bisa dicek di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Nah jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi apa yang disampaikan oleh Komisi VIII ini semata-mata karena memang kita punya ekspektasi dan harapan yang besar. Termasuk tentu sebagai mitra antara Baznas dengan Komisi VIII seharusnya kan kalau mitra itu tentu ada komunikasi yang baik

Pak apa yang di sampaikan oleh teman-teman ini kan mungkin karena ini kita baru sebagai Komisi VIII Pak, belum terjadi ta'aruf begitu ya. Belum terjadi hubungan yang sangat dekat. Karena beberapa kasus teman-teman sampaikan kepada Pimpinan ke kami begitu misalnya ada kegiatan Baznas di satu daerah padahal di situ adalah daerah Komisi VIII Pak ya. Konsituen mereka tanya bukannya Komisi VIII itu mitranya Baznas? kok kami tidak tahu. Nah kira-kira begitu jadi mungkin untuk hubungan yang baik kemitraan antara Komisi VIII dengan Baznas saya kira jika Bapak atau Baznas ada kegiatan dimanapun tentu ya tentu sebaiknya apalagi di daerah yang ada di sana Anggota Komisi VIII kita dapat berkomunikasi dengan baik Pak.

Saya kira demikian kami persilakan kepada Pak Kepala untuk menyampaikan tanggapannya. Silakan secara umum juga tidak apa-apa Pak yang terpenting Bapak menjawab apa yang disampaikan oleh para Anggota silakan Pak.

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Terima kasih Pak Ketua barang kali saya akan menjawab secara umum ya. Nanti mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan. Sebetulnya apa yang dirangkum oleh Pak Ketua tadi cukup baik merangkum semua yang disampaikan oleh para Anggota yaitu bahwa harapan dari Komisi VIII tentang optimalisasi pengumpulan zakat infaq sodaqoh dan dana sosial keagamaan lainnya karena potensinya besar karena Indonesia adalah apa peringkat satu dalam apa namanya apa *Charity Index* itu *World Charity Index* yang dikeluarkan oleh Charity Aid Fondation betul kita itu adalah bangsa yang paling dermawan ya.

Namun demikian, sebetulnya yang dikumpulkan melalui Baznas dan LAZ memang untuk tahun 2019 itu 10,2 dan harapannya nanti 2020 itu bisa mencapai 12,4 triliun ya. Tapi kami menduga keras ya bahwa sebetulnya yang dibayarkan kepada masyarakat ya dalam bentuk zakat itu jauh melampaui itu. Cuma banyak sekali zakat itu yang di bayarkan oleh muzaki kemudian langsung dibagikan sendiri. Jumlah ini kami duga besar sekali. Juga yang dibayarkan melalui amil-amil zakat yang tidak resmi yang tidak punya kewenangan ya itu juga kami duga sangat besar sekali.

Oleh karena itu sekarang ini Baznas sedang meneliti ya bersama-sama dengan dirjen Bimas Islam Kementerian Agama kemudian Departemen Ekonomi Syariah Bank Indonesia kemudian juga dengan Komisi Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS ya. Kami melakukan penelitian bersama-sama untuk mengukur ya sebetulnya berapa zakat yang dibayarkan itu oleh masyarakat yang tidak melalui Baznas atau LAZ resmi. Itu sedang dalam proses pengukuran. Insyallah nanti pada akhir tahun ini angka itu sudah keluar jadi itu bukan hanya angka menurut Baznas tentu ada lembaga-lembaga lain yang kredibel yang ikut terlibat dalam pengukuran itu.

Dugaan kami hipotesis kami adalah bahwa yang dibagikan langsung oleh muzaki dan yang dibayarkan melakukan melalui amil zakat resmi itu

lebih besar dari yang sekarang ini terkumpul. Jadi untuk tahun 2020 kalau perkiraan kami nanti akan terkumpul 12,4 triliun ya yang di luar itu bisa-bisa itu lebih besar dari itu. Jadi bisa-bisa nanti angkanya nanti bukan 12 lagi tapi menjadi sekitar lebih dari 25 triliun ya. Ini sekaligus menjadi masukan nanti bagaimana yang semacam ini ke depannya lagi untuk harus diatur ya barangkali itu menjadi masukan bagi amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ya tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian mengenai kewajiban LAZ melapor ya memang semua LAZ sekarang ini LAZ itu ada jumlahnya berapa ya? Ya? 112 LAZ ya. Itu dan berapa kontribusi dari LAZ ini -yang LAZ resmi saja ya- ini terhadap pengumpulan zakat kurang lebih 35% sampai 40% ya pengumpulan zakat tadi yang saya kita harapkan Rp12.4Triliun tahun ini itu adalah disumbangkan oleh LAZ. Jadi peranan LAZ dalam pengumpulan zakat ini sangat besar.

Kemudian mengenai tadi juga mengenai rumah zakat. Rumah zakat itu salah satu LAZ nasional yang punya kantor pusat di Bandung. Ini termasuk LAZ yang tertib dan selalu melaporkan kepada Baznas bahkan pelaporan mereka itu mereka datang sendiri menemui saya dan kemudian menyerahkan laporannya mengenai rumah zakat dan LAZ yang termasuk tertib terhadap laporannya. Memang masih ada ya LAZ-LAZ yang liar yang memang apa melanggar undang-undang tidak ada izin dari Kementerian Agama ya tapi ini bertindak sebagai LAZ. Untuk itu maka kami melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama ya dan juga dengan Bareskrim POLRI dan ini sudah kami melakukan pendekatan dalam proses untuk membikin MOU mengenai bagaimana menangani LAZ-LAZ liar seperti ini. Itu bagaimana menindak dan menyangsi mereka. Kami sudah melakukan itu dan sekarang masih dalam proses finalisasi karena Covid ini dan karena pergantian Pimpinan di POLRI maka kemudian tertunda-tunda terus.

Kemudian mengenai insentif pajak pasal 22 itu adalah bahwa zakat yang dibayarkan kepada Baznas atau LAZ resmi yang masuk dalam daftarnya Direktorat Jenderal Pajak itu bisa bias dikurangkan pada penghasilan kena pajak. Maksudnya adalah pajak penghasilan. Jadi dikurangkan pada penghasilannya bukan kekurangan kepada pajaknya. Jadi pada penghasilan pajaknya bukan kepada pajaknya. Ini yang dalam kenyataannya ini fasilitas atau insentif ini tidak banyak yang memanfaatkannya. Kurang menarik itu.

Oleh karena itu di dalam amandemen undang-undang yang kita usulkan itu kita perbaiki insentif pajak itu menjadi bahwa zakat yang di bayarkan kepada Baznas atau LAZ resmi bisa langsung mengurangi pajaknya. Bisa langsung mengurangi pajaknya. Nah tentu ini perlu dilakukan pendekatan dengan Kementerian Keuangan ya. Makanya di dalam rancangan undang-undang yang kami usulkan itu ada salah satu klausul yang menyatakan bahwa Kementerian Keuangan bisa memperhitungkan zakat yang di kumpulkan melalui Baznas atau LAZ resmi sebagai bagian dari apa penghitungan rasio pajak. Jadi rasio pajak terhadap ... karena ini salah satu ukuran dari kinerja Kementerian Keuangan. Itu berapa bagian rasio pajak terhadap apa produk domestic bruto lah. Tentu saya kira saya duga kalau itu sampai betul-betul masuk dan disetujui dalam Undang-Undang Kementerian

Keuangan ingin apa juga apa mendapatkan kewenangan yang lebih dalam penggunaan dana zakat, supaya betul-betul dana zakat itu bisa melengkapi ya, APBN. Betul-betul dana pajak, dana zakat itu menjadi bagian dari instrumen fiskalnya Kementerian Keuangan meskipun tidak langsung dikelola oleh Kementerian Keuangan.

Kemudian mengenai kemitraan dengan Komisi VIII di dapil-dapil para Anggota ya itu saya kira bicarakan saja nanti pelaksanaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan ya kita akan akomodasi saja. Juga tadi yang barangkali yang disampaikan oleh Pak Doktor Hidayat Nurwahid bantuan untuk madrasah atau pesantren itu apakah ada jadi cukup banyak sebetulnya permohonan publik ya untuk madrasah dan pesantren ini jadi kami juga mengalokasikan untuk itu.

Kemudian untuk bantuan untuk mahasiswa di luar negeri seperti di Mesir ya untuk penyiapan .... kami juga melakukan itu, bantuan atau bahkan beasiswa untuk kader ulama seperti mahasiswa-mahasiswa yang sedang belajar di Mesir atau di tempat-tempat lain. Ada juga yang di Malaysia kami juga memberikan beasiswa ya. Di dalam negeri sendiri ada sekitar 1.600 mahasiswa yang kita beri beasiswa.

Kemudian tentang bank makanan ya. Bank makanan itu memang kami sudah merintis bank makanan itu yang bekerja sama dengan apa beberapa hotel dan restoran itu memang besar sekali apa makanan yang kemudian di buang sia-sia itu. Kami sudah melakukan itu tapi kemudian karena pandemi ini kemudian ya menjadi terbatas gerak kami untuk melakukan itu. Barangkali ada yang ingin menambahkan ya silakan Pak Arifin.

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**Yang kami hormati Pimpinan Sidang, seluruh Anggota DPR RI.**

**Bapak Ketua Baznas Bapak Wakil Ketua dan para Anggota dan rekan-rekan direksi.**

Saya ingin melakukan beberapa yang belum ditekankan jawabannya oleh Pak Ketua yaitu tentang informasi mengenai targetnya 12 triliun tetapi hari ini didapat zakat sebesar 200 miliar memang sepertinya membingungkan tetapi sudah dikoreksi dalam laporan Pak Bambang bahwa target kita hari ini yang dipaparkan adalah target Baznas pusat. Sedangkan target 12 triliun adalah target Baznas seluruh Indonesia dan LAZ. Untuk sebagai pengetahuan kira-kira sekarang ada sekitar 500 lembaga baik Baznas pusat, Baznas provinsi, kabupaten, kota dan lembaga amil zakat yang kira-kira sumbangannya adalah 60% dari Baznas keseluruhannya dan 40% dari LAZ keseluruhannya. Kira-kira itu komposisinya Pak Ketua sehingga Baznas ingin memberi contoh untuk menaikkan lebih dari rata-rata kenaikan nasional yang kira-kira sekarang 24% dengan menargetkan di pusat sebesar 35 sampai 40% setiap tahunnya.



Dan alhamdulillah pada 5 tahun ini bisa dicapai dan saya ingin memberikan sedikit kalau boleh lanjut. Ini tadi dikatakan ada yang meleset gambarnya karena targetnya dan pencapaiannya sama. Saya mohon maaf untuk meralat itu tadi paparan Pak Bambang tadi sudah coba diralat. Kira-kira kenaikan dari tahun lalu kita sekarang mencapai angka 46% di setengah tahun ini. Lalu pertanyaan mengapa kok masih ada saldo? Karena memang dalam pencapaian zakat setahun itu tidak rata tiap bulannya. Ada menggunung di ramadhan. Jadi memang tidak habiskan di akhir ramadhan kami akan membagi puncak pencapaian ramadhan itu sebanyak setengah tahun berikutnya. Itu mengapa kami tidak menghabiskan 0 rupiah pada bulan ini karena memang kita harus membagi rata pencapaian bulanan yang tidak rata begitu.

Lanjut sedikit. Ini pertanyaan tentang digital. Jadi mengapa kita bisa bertahan? Karena memang kita mencoba mendorong pengumpulan digital tidak di tahun ini saja tapi sudah mulai di tahun 2016 dengan pencapaian yang cukup baik dari 0,4% di 2016 sekarang sudah mencapai 24% dari seluruh pengumpulan Baznas. Lanjut, sedikit lagi lanjut kira-kira ini kami sekarang mencoba bekerja sama dengan semua toko-toko digital yang ada. Jadi kira-kira kita buka semua toko digital insyallah sudah ada pilihan Baznas baik untuk (zakat, infaq, sedekah) juga hari ini cob kita tampilkan untuk campaign qurban karena qurban adalah bagian dari dana sosial keagamaan lainnya yang tercantum dalam Undang-Undang Zakat yang dikelola oleh Baznas.

Lanjut. Nah ini saya ingin coba gambarkan tentang apa rencana kita untuk masa depan. Jadi kalau dari grafik yang kita naikan dalam 5 tahun ini kalau itu dipanjangkan sampai apa namanya normal saja maka pencapaian kita masih sangat kecil dan untuk mencapai 50 triliun ini membutuhkan tahun yang lebih panjang. Oleh sebab itu sebenarnya kita mendorong 1 gagasan dimana Baznas bisa memfasilitasi ASN. Jadi Baznas pusat memfasilitasi ASN tingkat pusat, Baznas daerah memfasilitasi Baznas daerah. Dan kalau kita hitung kita duga, seandainya itu terjadi di tahun depan misalnya kita bisa menaikkan pencapaian zakat sampai ke 40 triliun tanpa mengubah undang-undang. Kalau undang-undang itu di ubah sehingga kita bisa struktural dan mewajibkan maka seperti tadi di hitungan Pak Bambang akan lebih tinggi lagi pencapaiannya. Jadi kalau di tanya sebenarnya dengan cara *marketing* saja tentu saja grafis yang putus-putus ini bisa dicapai kalau pelaksanaannya benar.

Tapi kita perlu lompatan sebenarnya oleh sebab itu memang dengan tidak ingin mengeluh kita ingin mendorong agar ada fasilitasi lebih kuat dorongan lebih kuat kepada rekan-rekan ASN untuk bisa difasiliatsi zakatnya terutama kepada mereka yang sudah nisab, beragama islam, dan bersedia berzakat ke Baznas. Kira-kira itu Pak yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bisa menjawab tentang progres dan cita-cita kita dalam pengumpulan dan tahun ini dengan hitungan kita mencapai 400 miliar di Baznas pusat kita sudah menjadi organisasi pengelola zakat terbesar di Indonesia. Kita bisa menjadi contoh kepada teman-teman di daerah dan lembaga amal zakat untuk bisa membuat program.

Sekali lagi ada pertanyaan tentang apakah kita mengikuti perundangan? Ada dua yang ditekankan selalu di Baznas saya sebagai direktur utama selalu dikasih *guidance* dua besar. Pertama jangan melanggar syariah dan tetap mengikuti perundang-undangan yang berlaku dan kami selalu menjaga itu dan mudah-mudahan seluruh kegiatan yang di lakukan oleh unit pelaksana yang saya Pimpin itu dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan dan mengikuti perundangan yang berlaku.

Terakhir barangkali saya ingin menjawab tentang biaya sosialisasi kenapa kok belum keluar? Memang kami ada di TVRI dan Republika karena TVRI itu jangkauannya nasional. Republika kami anggap sebagai koran yang bisa mewakili apa muzaki muslim terutama di kota-kota besar. Itu memang kami bayar di akhir tahun jadi akan keluar setiap Senin kalau bisa di lihat ada di artikel kita ada kolom rutin kita di Republika dan kita mengkampanyekan cukup banyak di media sosial. Jadi hari ini kami telah memenangkan dalam tanda kutip pertarungan *brand* zakat dari lembaga-lembaga zakat yang sudah dulu ada di banding Baznas. Jadi kalau pakai *google trend* pakai analisis yang lain di digital kami sekarang lebih dicintai oleh masyarakat itulah yang menyebabkan kami bisa naik setiap tahun 40%. Kira-kira itu tambahan Pak Ketua dari saya terima kasih.

**F- PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID B.A., M.A):**

Maaf Pimpinan sedikit.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Jangan lama-lama Bu.

**F- PKS (Hj. NUR AZIZAH TAMHID B.A., M.A):**

Tadi yang saya tanyakan apakah Badan Amil Zakat Nasional ini membedakan pembukuan antara zakat, infaq, sedekah? Karena di sini apa di halaman ini kan membangun rumah sehat Baznas. Nah di halaman selanjunya pengumpulan ZIS di era Covid-19 mengalami kenaikan secara cepat 46% dibandingkan periode yang sama dengan tahun lalu Januari Juni 2019 dikarenakan kesiapan Baznas di dalam mengantisipasi pengumpulan melalui digital.

Oleh karena itu karena ini Komisi VIII otomatis ikut bertanggung jawab Pak makanya saya ingin apa namanya klarifikasi benar. Apakah pengumpulan zakat sendiri, infaq sendiri, sedekah sendiri? Karena peruntukannya untuk rumah apa namanya rumah sehat zakat. Padahal kalau kita lihat undang-undang pengumpulan, peresmian, pendayagunaan dan pelaporan ini terkait zakat infaq sedekah itu harus dibukukan masing-masing peruntukannya pun harus disesuaikan dengan syariah Islam di undang-

undang itu begitu. Nah ini ingin kejelasan supaya kalau ini jelas insyallah tidak ikut dosa begitu Pak. Khawatir dosa nanti kalau ingatkan begitu itu saja.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Sesuai dengan undang-undang dan juga PP nya pelaksanaan undang-undang itu apa pembukuan untuk zakat itu harus dipisahkan dari infaq sedekah dan dana sosial lain-lainnya. Jadi punya akun-akun sendiri tidak di campurkan begitu karena syariahnya juga berbeda. Kemudian juga kalau untuk zakat itu hal amilnya kan hanya 12.5% tapi kalau untuk zakat infaq misalnya itu sesuai dengan Peraturan Menteri Agama sampai 20% misalnya. Jadi kami tidak mencampurkan itu, juga kalau ada CSR dari perusahaan itu juga tidak dicampurkan semuanya itu adalah punya akun-akun sendiri. Untuk rumah sehat itu, silakan Pak.

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Baik Ibu saya bisa menambahkan untuk rumah sehat, rumah sehat adalah cara kami untuk melayani masyarakat miskin dalam bantuan kesehatan. Bangunannya sendiri itu biasanya sumbangan dari CSR sumbangan dari yang lain tetapi biaya pengobatan rutinnya untuk beli obat atau pelayanan itu dari dana zakat Ibu. Asnaf apa adalah asnaf fakir miskin. Jadi kami membantu fakir miskin itu dengan melihat sebabnya. Kalau fakir miskin datang karena sakit kami dikasih saluran namanya program kesehatan. Kalau fakir miskin datang karena bencana dikasih rumah sementara atau di kasih bantuan yang lain. Kalau dia datang karena bantuan pendidikan dibutuhkan kita berikan beasiswa.

Jadi itu asnafnya sesuai 8 asnaf Ibu. Tetapi nanti diberikannya sesuai dengan kebutuhannya mereka. Jadi yang datang ke rumah sehat diharapkan orang-orang miskin yang sakit agar pulang-pulang bisa sehat. Makanya namanya kami beri nama rumah sehat Bu, banyak kalau ada gambar bisa di tampilkan. Ada di beberapa kota baru ada 6 Bu akan lahir sebentar lagi di seperti ini, ini boleh dibesarkan ini dimana ini yang kanan? Di Jogja ini, ini sumbangan dari PGN ya? Jadi bangunannya itu disumbang sama PGN itu juga ada logo BRI tapi obatnya itu sehari-hari dari zakat untuk orang miskin itu. Mudah-mudahan ini sesuai dengan syariah dan perundangan dan tadi Pak Bambang sudah sampaikan memang sering disebut zakat Ibu karena undang-undangnya zakat tapi di dalam katanya itu bukan Undang-undang zakat infaq sedekah begitu. Jadi ketika kita menyebut zakat sebenarnya di dalam Undang-undang itu ada zakat, infaq, sedekah begitu. Tetapi ketika kita mengelola akun kami memisahkan itu dan membagikan sesuai dengan syariahya terima kasih Ibu.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Saya kira cukup ya Bapak Ibu sekalian kita langsung ke kesimpulan.

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Pak Ketua boleh sedikit saja tadi belum disinggung, yaitu kami akan memberikan laporan tertulis.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Nanti tolong laporan tertulis yang soal apa namanya yang LAZ terutama ya. Saya bacakan kesimpulan kita nanti mohon di kritisi.

Draft kesimpulan rapat dengar pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019 2020 Rabu 15 Juli 2020 dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Amil Zakat Nasional dengan Agenda Evaluasi Kinerja Dan Anggaran Tahun 2020 Evaluasi Kinerja dan Anggaran Penyaluran Sosial Penanggulangan Dampak Covid-19 serta Isu-Isu Aktual Dan Solusinya.

Di simpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Komisi VIII telah mendapat penjelasan Badan Amil Zakat nasional mengenai.
  - a. Capaian pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh oleh Baznas tahun 2020 yang ditargetkan sebesar Rp.12.480.000.000.000.
  - b. Pengelolaan dana dari APBN 2020 untuk Baznas sebesar 8 miliar di gunakan untuk Covid sebesar Rp.724.690.000 sehingga total net anggaran APBN 2020 sebesar Rp.7.275.310.000.
  - c. Realisasi APBN 2020 Baznas digunakan untuk kebutuhan rutin operasional sebesar Rp.2.653.895.551 atau 35,2% selama Januari sampai Juni 2020.
  - d. Target dan realisasi pengumpulan Baznas pusat sebesar Rp.240.399.699.301 dan realisasi pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, dan sodaqoh Rp.139.274.197.629 periode Januari-Juni 2020
2. Komisi VIII DPR RI mengapresiasi realisasi pengumpulan zakat Baznas pusat Januari Juni 2020 sebesar Rp.240.399.699.031 yang melampaui target periode yang sama Januari 2019 sebesar Rp.156.832.177.465 atau tumbuh 53,28%.

3. Selanjutnya Komisi VIII DPR RI meminta Baznas untuk memaksimalkan target pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh pada akhir tahun 2020.
  - a. Meningkatkan sosialisasi zakat, infaq, dan sodaqoh melalui media sosial, media cetak, dan media elektronik nasional guna memaksimalkan pengumpulan dana ZIS secara optimal.
  - b. Meningkatkan sinergitas penyaluran dan pendayagunaan dana ZIS dengan program pengentasan kemiskinan bagi masyarakat yang terdampak Covid-19 di berbagai daerah secara transparan, akuntabel dan merata.
  - c. Mendukung Baznas untuk melakukan kajian mengenai amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dalam rangka meningkatkan penguatan kelembagaan kinerja pengumpulan zakat, infaq, dan sodaqoh.
  - d. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas Baznas pusat, Baznas provinsi, Baznas kabupaten kota dalam rangka dalam peningkatan kinerja pengumpulan dan penyaluran dana ZIS sekaligus menghimpun data dan pemetaan kantong-kantong kemiskinan di Indonesia.
  - e. Perlu lebih selektif dan taat asas syariah Islam dalam pengalokasian dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sodaqoh agar tidak melanggar prinsip-prinsip syariah dan keadilan bagi mustahik.
  - f. Meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat terhadap pengelolaan zakat, infaq, dan sodaqoh dengan memperbaiki kinerja integritas, tranparansi, dan akuntabilitas pengumpulan dan pengelolaan zakat.
  - g. Mendorong Baznas untuk membuat grand desain program pengentasan kemiskinan guna meningkatkan kepercayaan masyarakat mustahik zakat.
  - h. Melakukan koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dalam rangka pengawasan dalam rangka lembaga-lembaga amil zakat, infaq, dan sodaqoh dalam rangka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
  - i. Kami menambahkan Komisi VIII meminta Baznas mengajukan pokok-pokok materi tentang revisi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat secara tertulis.

Oke dari Anggota ada yang mau di sampaikan? Cukup?

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Izin Bapak Ketua, saya cuma ini saja yang nomor 1A itu ada capaian pengumpulan zakat, infaq, dan sedekah oleh Baznas Nasional untuk membedakan karena jumlahnya 12 juta, 12 triliun ya.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ini oleh Indonesia dan LAZ se- Indonesia?

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Ya itu lebih lengkap lagi. Yang kedua Bapak Ketua ini cuma typo, typo eror saja nomor 3G itu karena kita pakai bahasa inggris gand jadi desain itu pun design sebaiknya ya karena depan sudah pakai g pakai grand desain desig gn.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Nomor berapa itu? Ada yang lain?

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Nomor 3F ini transparansi ya.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Transparansi ya?

**DIREKTUR UTAMA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (MOHAMAD ARIFIN PURWAKANANTA):**

Itu saja dari saya.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Oke dari. Ya silakan Pak Hidayat Nurwahid.

**F- PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A. ) :**

Ya terima kasih Pak Ketua. Jadi Kepala Baznas, Ketua Baznas merespon apa yang saya sampaikan dikaitkan dengan kegiatan Baznas yaitu Bank Makanan, direspon bahwa itu kegiatan mereka dan kerja dan berlaku dengan baik. Disampaikan bahwa kegiatan ini bagus tapi payung hukumnya belum ada Pak Ketua. Karenanya saya berharap bisa ditentukan disini bahwa kegiatan Bank Makanan itu penting untuk mempertimbangkan segera bisa hadirnya payung hukum dan rancangan undang-undang tentang bank makanan untuk kesejahteraan sosial. Terima kasih Pak Ketua.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Ya coba TA berarti ada poin baru ini. Ya. Melakukan kajian tentang payung hukum bagi kegiatan bank makanan oleh Baznas begitu ya Pak?

**F- PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A. ) :**

Mungkin bukan melakukan kajian ya. Kerja sama untuk menghadirkan payung hukum begitu. Karena tadi saya sampaikan payung hukum ini bisa kita kerjakan di DPR begitu ya sehingga kalau Baznas menjadi bagian dari yang menyelenggarakan kegiatan ini maka penting Baznas untuk menjadi bagian dari yang bekerja sama merealisasikan payung hukum ini.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Melakukan kerja sama.

**F- PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A. ) :**

Untuk menghadirkan payung hukum bagi kegiatannya. Jadi kegiatan Bank Makanan Baznas.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Cukup segitu Pak? Oke.

**F- PKS (Dr. H.M. HIDAYAT NURWAHID, M.A. ) :**

Terima kasih.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Sekali lagi saya berikan kesempatan kepada Anggota yang hadir cukup? Kepada Baznas cukup? Ada hal yang perlu.

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Itu yang nomor 4 kan Komisi VIII DPR RI meminta Baznas mengajukan pokok-pokok materi tentang Revisi Undang-Undang 23 2011 tentang Pengelolaan Zakat itu yang dimaksudkan apa-apa naskah akademiknya atau bagaimana? Karena kami sudah siap dengan naskah akademiknya.

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

Bapak bisa naskah akademik poin-poin penting bisa diserahkan kepada kami karena otoritas untuk membuat naskah akademik dan lain-lain ada pada Badan Keahlian DPR Pak. Jadi kalau Bapak ada naskah akademik silakan serahkan kepada kami.

Saya kira demikian karena untuk diketahui oleh Bapak Ibu sekalian kami pun juga mengajukan dalam prolegnas ada revisi terhadap Undang-Undang Zakat ini. Nah soal pembahasannya terus terang saja kami sampaikan kami sekarang lagi fokus kepada dua undang-undang dulu Pak yaitu Undang-Undang tentang Penanggulangan Bencana dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Lanjut Usia. mungkin kalau penanggulangan bencana sudah selesai kami pertimbangkan zakat akan masuk ke situ.

Jadi oleh karena itu kami penting juga untuk mendapatkan masukan-masukan ya terutama untuk poin-poin apa yang kira-kira dari proses pengalaman Bapak Ibu sekalian dipengelolaan zakat yang perlu di revisi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian terima kasih atas kehadiran dan masukan-masukannya yang luar biasa. Sebelum kami tutup kami persilakan kepada Bapak Ketua Amil Zakat Nasional untuk menyampaikan kata akhir silakan Pak

**KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Prof. Dr. BAMBANG SUDIBYO, M.B.A., C.A.)**

Terima kasih.

**Yang kami hormati Bapak Pimpinan Komisi VIII.**

**Bapak Doktor Haji Ace Hasan Syadzily.**

**Dan Bapak Laksmana Madya TNI Purnawirawan Moeklas Sidik, M.P.A.**



**Yang kami hormati pula para Anggota Komisi VIII baik yang mengikuti sidang ini secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual.**

Alhamdulillah pembahasan hari ini rapat dengar pendapat antara Komisi VIII dengan Badan Amil Zakat Nasional berlangsung dengan baik kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI atas berbagai masukan ya, dukungan ya, dan juga berbagai kritikan ataupun catatan-catatan yang perlu kami perhatikan di dalam pengelolaan zakat baik itu di Baznas pusat maupun kami mengkoordinasikan seluruh organisasi pengelola zakat di Indonesia baik itu Baznas provinsi Baznas kabupaten kota dan juga LAZ di seluruh Indonesia. Saya kira apa yang kita lakukan ini sangat penting dan untuk kedepannya bisa menjadi *guideline* pedoman dalam pengelola zakat di kemudian hari. Demikian sambutan kami.

*Wa Billahi Taufiq Wal Hidayah*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**KETUA RAPAT/ F- PARTAI GOLKAR (Dr. H. Tb. ACE HASAN SYADZILY, M.Si.):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh*

**Bapak Ibu sekalian.**

**Para Anggota dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional dan seluruh jajarannya.**

Demikian sudah rapat kita hari ini kita mulai tadi pukul 13.00 dan berakhir pada pukul 16.30. Tak terasa Pak Ketua berarti memang teman-teman Komisi VIII ini memiliki perhatian yang sangat serius terhadap Baznas dan tentu ucapan terima kasih kami sampaikan ya kepada Pak Ketua Wakil Ketua para Anggota dan seluruh eksekutif di Baznas yang telah hadir dalam rapat ini dan menanggapi berbagai macam masukan, tanggapan, serta kritikan. Semoga apa yang kita lakukan ini masukan, pendapat, pandangan konseptual maupun praktek-praktek di lapangan yang disampaikan oleh para Anggota menjadi hal yang sangat berharga dalam upaya kita untuk bagaimana pemerintah memiliki perhatian yang serius. Juga kami di Komisi VIII memiliki perhatian yang serius terhadap kehidupan zakat, infaq, dan sodaqoh di negeri kita sebagai bagian dari upaya kita menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan bangsa kita. Demikian acara ini kami tutup dengan membacakan *hamdallah Alhamdulillah hirabil alamin*.

*Wallahu Muwaffiq ila aqwamit Tharieq.*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 16:25)**

**Jakarta, 15 Juli 2020  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,**

**Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.  
NIP. 197309261997031001**